



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN
Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta

RENCANA STRATEGIS

Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta

TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai pedoman dalam penetapan arah kebijakan, strategi, serta pengalokasian sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode lima tahun ke depan.

Sebagai unit kerja Eselon II, Renstra Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025–2029 disusun sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Renstra ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan operasional tahunan. Implementasinya akan dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan secara berkala berdasarkan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut menjadi dasar dalam penyusunan maupun penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sehingga seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap selaras dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan.

Pimpinan dan seluruh jajaran Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan mampu mengimplementasikan Renstra Tahun 2025–2029 secara konsisten dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Hal ini

diperlukan untuk mendukung pencapaian Visi Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025–2029, yaitu “Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Berkualitas untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, melalui peran strategis Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peningkatan kualitas dan akses pelayanan Keluarga Berencana, penguatan kebijakan kependudukan dan pengendalian penduduk, serta pembangunan keluarga.

Akhir kata, semoga Renstra Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025–2029 ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara konsisten, serta memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya pembangunan kependudukan dan keluarga yang berkualitas.

Yogyakarta, 30 Desember 2025
Kepala,



Mohamad Iqbal Apriansyah, SH., M.P.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
I.1 Kondisi Umum	8
A. Keterkaitan Renstra 2020-2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	8
B. Capaian Kinerja Renstra 2020-2024	11
C. Fokus Utama Kemendukbangga/BKKBN.....	21
I.2 Potensi dan Permasalahan	27
A. Potensi dan Peluang	27
B. Permasalahan dan Tantangan	37
BAB II KETERKAITAN TERHADAP VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENDUKBANGGA/BKKBN, SERTA SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/RINCIAN <i>OUTPUT</i>	47
II.1 Keterkaitan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung Visi Kemendukbangga/BKKBN	47
II.2 Keterkaitan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung Misi Kemendukbangga/BKKBN	47
II.3 Keterkaitan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis Kemendukbangga/BKKBN	50
II.4 Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Rincian <i>Output</i> Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta	57
II.5 Mitigasi Risiko	65
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	73
III.1Arah Kebijakan dan Strategi.....	73
- Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	73
- Arah Kebijakan dan Strategi Kemendukbangga/BKKBN	75
III.2Kerangka Regulasi.....	86
III.3Kerangka Kelembagaan	87
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	92
IV.1 Target Kinerja	93
- Keterkaitan Target Kinerja Renstra 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.....	93
- Target Indikator Kinerja Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025-2029	99
IV.2 Kerangka Pendanaan.....	106
BAB V PENUTUP	108
LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Baseline indikator Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2020–2024	8
Tabel 1. 2 Perbandingan Capaian 2020-2024 terhadap Target akhir Indikator Kinerja Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam Renstra BKKBN 2020-2024	12
Tabel 2. 1 Indikasi Risiko terhadap Sasaran Strategis	67
Tabel 2. 2 Indikasi Risiko terhadap Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta	69
Tabel 4. 1 Kesesuaian Indikator RPJMN 2025-2029 dan Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029	93
Tabel 4. 2 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta	99
Tabel 4. 3 Sasaran strategis, Indikator Sasaran Strategis, dan Target Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta	100
Tabel 4. 4 Sasaran Kegiatan beserta Indikator dan Target Kegiatan Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta	101
Tabel 4. 5 Rancangan Output (RO), Klasifikasi Rancangan Output (KRO), dan Target.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan	7
Gambar 3. 1 Total Fertility Rate VS Tingkat Penggunaan Kontrasepsi Modern .	83
Gambar 3. 2 Total Fertility Rate (TFR) vs Demand Satisfied.....	85



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Indonesia Emas 2045 bertujuan untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan nasional, termasuk perekonomian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sosial budaya, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi pembangunan dan 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang diukur dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Misi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 terdiri dari: (1) transformasi sosial; (2) transformasi ekonomi; dan (3) transformasi tata kelola; dengan ditopang oleh dua landasan transformasi yaitu (4) supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; serta (5) ketahanan sosial budaya dan ekologi; yang dilaksanakan dengan mengacu pada tiga kerangka implementasi transformasi (6) mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; (7) mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan (8) mewujudkan kesinambungan pembangunan. Transformasi tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan 17 (tujuh belas) arah (tujuan) Pembangunan Indonesia Emas dan merupakan komitmen Indonesia dalam melanjutkan 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.1:

Gambar 1. 1 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan



Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang diemban oleh Kemendukbangga/BKKBN sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memiliki peran strategis untuk mendukung transformasi sosial khususnya Kesehatan untuk semua dan landasan transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi khususnya Pembangunan Keluarga Berkualitas. Dalam rangka pelaksanaan RPJPN 2025-2045 tahap I telah ditetapkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Kemendukbangga/BKKBN mendukung Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi *Digital*, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru; Prioritas Nasional 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; dan Prioritas Nasional 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan RPJMN 2025-2029 tersebut, disusun Rencana Strategis Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029.

I.1 Kondisi Umum

A. Keterkaitan Renstra 2020-2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, BKKBN berperan dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) 3 Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

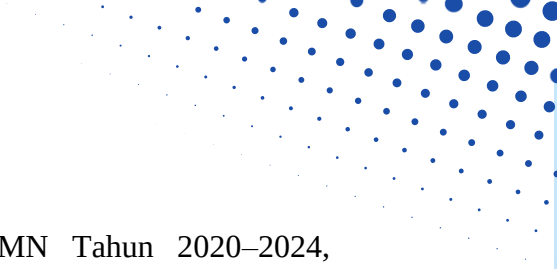
Sehubungan dengan hal tersebut, Renstra Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020–2024 disusun sebagai pedoman pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di tingkat provinsi agar selaras dengan Renstra Kemendukbangga/BKKBN. Tabel 1.1 menyajikan *baseline* indikator Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2020–2024.

Tabel 1. 1 *Baseline indikator Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2020–2024*

No	Program/Kegiatan	Dampak (Impact)/ Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan/ Keluaran (<i>Output</i>)		Indikator Dampak/ Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Kegiatan/ Indikator <i>Output</i>		Satuan	Target/Sasaran				
							Baselin e 2020	2021	2022	2023	2024
068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	I	Dampak (<i>Impact</i>) :	I	Indikator Dampak (<i>Impact</i>) :						
			Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,11	-	-	-	0,95
		II	Sasaran Strategis :	II	Indikator Sasaran Strategis :						
		1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per Wanita	2,26	2,24	2,21	2,19	2,1

No	Program/Kegiatan	Dampak (Impact)/ Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan/ Keluaran (Output)		Indikator Dampak/ Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Kegiatan/ Indikator Output		Satuan	Target/Sasaran				
							Baseline 2020	2021	2022	2023	2024
		2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	2	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR)	Persen	61,78	62,16	62,54	62,92	63,41
		3	Menurunnya kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi	3	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen	8,60	8,30	8,00	7,70	7,40
		4	Menurunnya angka kelahiran remaja	4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15- 19 tahun	25	24	21	20	18
		5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (Skala 0- 100)	53,57	55,00	57,00	59,00	61,00
		6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1
I	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	III	Sasaran Program Bangga Kencana Perwakilan BKKBN DIY	III	Indikator Sasaran Program Bangga Kencana Perwakilan BKKBN DIY						
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, serta	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata- rata anak per Wanita	1,92	1,9	1,87	1,85	1,83
				2	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive	Persen	62,01	62,4	62,79	63,17	63,67

No	Program/Kegiatan	Dampak (Impact)/ Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan/ Keluaran (<i>Output</i>)	Indikator Dampak/ Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Kegiatan/ Indikator <i>Output</i>	Satuan	Target/Sasaran					
					Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	
		mewujudkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		<i>Prevelance Rate</i> /mCPR)						
			3	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Persen	5,74	5,62	5,5	5,38	5,29
			4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19</i>)	Kelahiran per 1000 WUS 15- 19 tahun	17	16	14	13	12
			5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (Skala 0- 100)	61,43	63,07	65,36	67,66	69,95
			6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	23	23	23	23	23
			7	Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten	Persen	30	45	65	75	80
			8	Persentase Kerjasama Internasional Bangga Kencana yang diimplementasi kan	Persen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			9	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program Bangga Kencana	Persen	75,0	78,0	81,0	84,0	87,0



Dalam rangka melaksanakan mandat RPJMN Tahun 2020–2024, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai bagian dari pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Sasaran dan indikator tersebut mencerminkan arah kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, serta penguatan pembangunan keluarga guna mendukung terwujudnya struktur penduduk yang seimbang dan berkualitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Fokus pengendalian penduduk diarahkan pada pencapaian indikator utama seperti Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Total Fertility Rate (TFR), Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15–19), prevalensi kontrasepsi modern (mCPR), dan penurunan *Unmet Need* KB. Sementara itu, penguatan tata kelola program dilaksanakan melalui peningkatan kualitas data dan perencanaan berbasis bukti, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan indikator pembangunan keluarga, termasuk Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP). Secara keseluruhan, sasaran dan indikator tersebut menjadi pedoman pelaksanaan Program Bangga Kencana di Daerah Istimewa Yogyakarta secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

B. Capaian Kinerja Renstra 2020-2024

Mengacu pada Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025–2029, capaian kinerja Tahun 2024 diperlakukan sebagai hasil akhir evaluasi pelaksanaan Renstra Tahun 2020–2024 sekaligus sebagai dasar penajaman arah kebijakan dan penetapan fokus peningkatan kinerja pada periode perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu, Tabel 1.2 disusun untuk menyajikan ringkasan capaian indikator Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) pada akhir periode perencanaan, yang tidak hanya menggambarkan posisi capaian terakhir, tetapi juga mengidentifikasi indikator yang telah

menunjukkan kinerja optimal serta indikator yang masih memerlukan penguatan guna menjamin keberlanjutan dan pemerataan capaian kinerja di seluruh kabupaten/kota.

Tabel 1. 2 Perbandingan Capaian 2020-2024 terhadap Target akhir Indikator Kinerja Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam Renstra BKKBN 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi					%	Status Capaian
				2020	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024 *)	
A. Indikator Sasaran Strategis										
1.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	Rata-Rata kelahiran anak per WUS 15-49 Tahun	1,82	1,81	1,91	1,93	1,81	1,83	99,45	 Tercapai
2.	Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Persen	58,2	57,1	55,6	57,1	58,2	63,1	108,42	 Sangat Tercapai
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need	Persen	15,2	9,04	19,8	19,3	14,2	11,4	125	 Sangat Tercapai

No	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi					% Capaian 2024 *)	Status Capaian
				2020	2021	2022	2023	2024		
4.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	9,6	14	9,1	9,6	6,7	9	106,25	 Sangat Tercapai
5.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Persen	69,95	68,48	57,41	59,42	64,12	64,8	92,64	 Tercapai
6.	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	Tahun	23,5	22	22,9	23,2	23,5	23	97,87	 Tercapai
B. Indikator Sasaran Program/Indikator Sasaran Output										
Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana										
7.	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	Keluarga	46.256 Keluarga	43.856	40.900	40.580	45.656	37.515	81,10	 Cukup
8.	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat	PIK Remaja dan BKR	488	418	422	443	465	488	100	 Sangat Tercapai

No	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi					% Capaian 2024 *)	Status Capaian
				2020	2021	2022	2023	2024		
	pembinaan GenRe									
9.	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	Keluarga	959	619	1.186	1.804	3.985	5.047	526,28	 Sangat Tercapai
10	Persentase Kabupaten /Kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	Persen	100	100	70	100	90	100	100	 Sangat Tercapai
11	Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kepadudukan pada perencanaan pembangunan daerah	Persen	100% Prov & 100% Kab/Kota	100	100	100	100	100	100	 Sangat Tercapai
12	Jumlah Kelompok Kerja	Provinsi & Kab/ Kota	1 prov & 3 kab/kota	1 Prov & 1 Kab/ Kota	1 Prov & 1 Kab/Kota	1 prov & 2 kab/ kota	1 Prov & 15 Kab./ Kota	1 prov & 5 kab/ kota	100	 Sangat

No	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi					% Capaian 2024 *)	Status Capaian
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif									Tercapai
13	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di Provinsi	Jalur (formal, nonformal, dan informal)	3 jalur (formal, non formal, & informal)	3	3	3	3	3	100	 Sangat Tercapai
14	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Persen	85	92,30	114	99,15	80,68	85,24	100,28	 Sangat Tercapai
15	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index MII)	Indeks (Skala 0-100)	78,35 (Skala 0-100)	86	72,37	54,94	55,53	68,2	87,05	 Cukup
16	Persentase Kesertaan KB di Kabupaten /Kota dengan kesertaan	Persen peserta KB	57,49	72,41	87,26	58,81	63,33	64,08	111,46	 Sangat Tercapai

No	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi					% Capaian 2024 *)	Status Capaian
				2020	2021	2022	2023	2024		
	rendah									
17	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	Persen	22,30	25	11,5	11,8	11,09	11,80	147,09	 Sangat Tercapai
18	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	Persen	29,41	19,60	15,88	20,25	48,08	53,17	180,79	 Sangat Tercapai
19	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	Stakeholder/Mitra	24 Stakeholder/Mitra	35,6	37,6	22	23	24	100	 Sangat Tercapai
20	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	Persen	75	55	75,98	65	70	80,60	107,47	 Sangat Tercapai
21	Persentase Penyuluh KB yang	Persen	90	90	70	75	80	97,27	108,08	 Sangat

No	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi					% Capaian 2024 *)	Status Capaian
				2020	2021	2022	2023	2024		
	berkinerja baik									Tercapai
22	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Kab/Kota	5 Kab/Kota	5	5	5	5	5	100	 Sangat Tercapai
23	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kab/Kota	Persen Wilayah Prov dan Kab/Kota	100	100	100	84,62	100	100	100	 Sangat Tercapai
24	Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	Persen	80	80,83	87,5	96	97,55	96,46	120,58	 Sangat Tercapai
Program Dukungan Manajemen										
25	Dukungan Manajemen di Provinsi (Terasuk gaji/001 dan pemeliharaan	Bulan	12 Bulan	12	12	12	12	12	100	 Sangat Tercapai

No	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi					% Capaian 2024 *)	Status Capaian
				2020	2021	2022	2023	2024		
	rutin/002)									
26	Indeks ZI WBK/WBBM	Indeks	85 (Skala 1-5)	92,3	93,24	84,52	79,43	89	104,71	 Sangat Tercapai

Sumber Data : Laporan Kinerja di Lingkungan Kemendukbangga/BKKBN

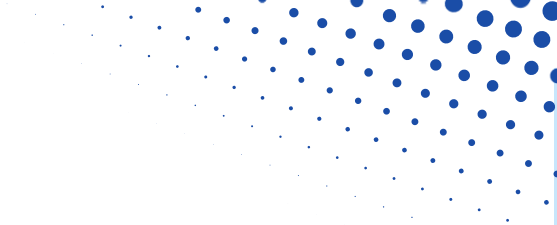
*) Persen Capaian 2024 adalah realisasi 2024 dibandingkan dengan target 2024

Penjelasan warna capaian :

Evaluasi Akhir Renstra K/L (Data Pemutakhiran)			
No.	Interval	Warna	Keterangan Capaian
1	$\geq 100\%$	biru 	Sangat Tercapai/ <i>Absolut Sustainability</i>
2	$>90-99\%$	hijau 	Tercapai/Berkelanjutan
3	$60-90\%$	kuning 	Cukup
4	$<60\%$	merah 	Kurang
5		putih 	Belum dapat diberikan notifikasi

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 6 (enam) indikator sasaran strategis, dengan uraian sebagai berikut:

- 3 (tiga) indikator dapat dicapai dengan kategori sangat tercapai, yaitu, Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) dari target 58,2 persen tercapai 63,1 persen (rasio capaian 108,42 persen); Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) dari target 15,2 persen tercapai 11,4 persen (rasio capaian 125 persen); Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR* 15-19) dari target 9,6 tercapai 9 kelahiran per 1.000 WUS 15-19 tahun (rasio capaian 106,25 persen).
- 3 (tiga) indikator dapat dicapai dengan kategori tercapai, yaitu,



Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dari target 1,82 tercapai 1,83 (rasio capaian 99,45 persen); Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dari target 69,95 tercapai 64,8 (rasio capaian 92,64 persen), dan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan dari target 23,5 tahun terealisasi 23 tahun (rasio capaian 97,87 persen).

Pada program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana terdapat 18 (delapan belas) indikator sasaran program dan sasaran *output*, dengan capaian sebagai berikut:

- a. 16 (enam belas) indikator masuk dalam kategori Sangat Tercapai. Keenam belas indikator ini meliputi Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe (100%), Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS (526,28%), Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga (100%), Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah (100%), Jumlah Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif (100%), Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi (100%), Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP (100,28%), Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah (111,46%), Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (147,09%), Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan (180,79%), Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana (100%), Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana (107,47%), Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik (108,08%), Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) (100%), Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (100%), dan Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori



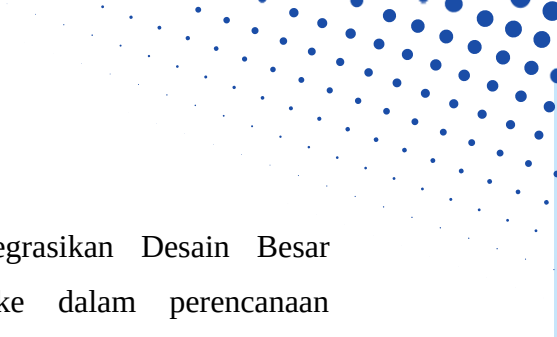
baik dan sangat baik (120,58%);

- b. 2 (dua) indikator masuk dalam kategori Cukup, yaitu, Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter (81,10%), dan Indeks Informasi Metode KB (*Method Information Index/MII*) (87,05%).

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis, sasaran program dan dukungan manajemen di atas, BKKBN pada periode 2020-2024 menargetkan pembuatan 28 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) meliputi Peraturan Kepala, Buku Pedoman maupun Petunjuk Teknis di bidang pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana). Target tersebut dapat direalisasi sepenuhnya.

Dapat disimpulkan pencapaian program Bangga Kencana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sudah baik namun perlu ditingkatkan lagi. Untuk program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, perhatian terutama akan diberikan untuk lebih memperbaiki kualitas pelayanan termasuk pemberian informasi komprehensif kepada klien. Diharapkan dengan makin baiknya informasi komprehensif yang diberikan maka akan berdampak pada turunnya tingkat putus pakai dan juga angka *Unmet Need*. Upaya penurunan tingkat kelahiran akan fokus pada daerah yang TFR dan ASFR 15-19 masih di atas angka rata-rata nasional serta daerah yang MUKP di bawah rata-rata nasional dan daerah yang MUKP 15 tahun ke bawah yang cenderung meningkat.

Untuk program pembangunan keluarga, target membangun keluarga Indonesia menjadi keluarga yang berkembang sudah tercapai. Pembangunan keluarga Indonesia di periode mendatang akan diarahkan pada bagaimana menjadi keluarga yang tangguh. Sedangkan, untuk program kependudukan ke depan diarahkan agar daerah serta lintas

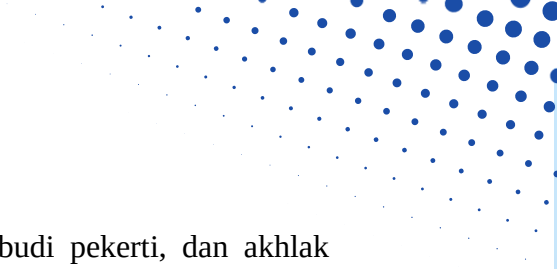


sektor di tingkat pusat makin mengintegrasikan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) ke dalam perencanaan pembangunan daerah maupun sektoral.

C. Fokus Utama Kemendukbangga/BKKBN

1. Fokus utama Kemendukbangga/BKKBN yang pertama adalah Pembangunan Keluarga. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung kebijakan ini dengan menyelaraskan program daerah agar sejalan dengan arah nasional, yaitu mewujudkan keluarga Indonesia berkualitas. Dukungan diwujudkan melalui penguatan fungsi keluarga, peningkatan ketangguhan, serta pengembangan modal sosial sesuai siklus kehidupan, sehingga penerapan fungsi keluarga dapat berjalan optimal di Yogyakarta. Kemendukbangga/BKKBN menetapkan kebijakan dalam penerapan fungsi keluarga secara optimal, di antaranya:
 - a. Mengoptimalisasi penerapan 8 (delapan) fungsi keluarga sesuai siklus hidup dari mulai pra-konsepsi, kehamilan, kelahiran, balita, anak, remaja, hingga lanjut usia;
 - b. Memperkuat ketangguhan keluarga dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anggota keluarga; dan
 - c. Mendorong terbentuknya modal sosial yang akan berdampak positif terhadap pencapaian keluarga yang tenteram, mandiri, dan bahagia menuju keluarga sejahtera dan berkualitas sebagai pondasi bangsa dan negara yang kuat.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 1 butir 10, menyatakan bahwa keluarga yang berkualitas adalah yang terbentuk dari perkawinan yang sah dan memiliki karakteristik sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang sesuai, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga adalah sebagai lingkungan pertama dan utama dalam membentuk kepribadian, merangsang pertumbuhan dan perkembangan, menanamkan nilai-nilai moral,



membentuk karakter, mengembangkan budi pekerti, dan akhlak mulia. Keluarga juga sebagai tempat perlindungan dan ketenteraman dari ancaman fisik maupun psikis. Sehingga pada gilirannya nanti setiap individu dapat berkembang optimal dan berkontribusi serta memberikan manfaat dan berdampak sosial untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya, hingga lanjut usia.

Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh dua indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) dan iBangga. IPKK merupakan indikator akhir yang mencerminkan kualitas keluarga secara komprehensif, mencakup dinamika internal serta lingkungan sosial, sedangkan iBangga menilai perkembangan kehidupan dalam keluarga. Kedua indikator tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan status pembangunan keluarga ke dalam kategori Tangguh, Berkembang, dan Rentan.

2. Fokus utama yang kedua adalah Kependudukan, yang diarahkan untuk pengarusutamaan penduduk sebagai objek pembangunan dan kerangka isu kependudukan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Mengacu pada Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga/BKKBN mendapat mandat untuk melakukan penyerasian kebijakan perkembangan kependudukan. Penyerasian kebijakan merupakan hal strategis yang harus dilaksanakan agar tujuan pembangunan berwawasan kependudukan dapat dicapai. Selain itu Kemendukbangga/BKKBN mendapat mandat untuk melakukan pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan Indonesia (GDPK), yang kemudian saat ini disusun teknis pelaksanaanya melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).



Sejalan dengan fokus tersebut, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta berperan dalam mendukung pengendalian kuantitas penduduk melalui kebijakan kependudukan yang menjadi rujukan pembangunan daerah, kebijakan dasar yang menjadi rujukan meliputi:

- a. Mempertahankan Total Fertility Rate (TFR) = 2,1 serta *Net Reproductive Rate* (NRR) = 1 untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang;
 - b. Mengurangi disparitas Total Fertility Rate (TFR) antar wilayah yang saat ini masih cukup tinggi. Untuk daerah yang TFR-nya telah mencapai atau mendekati 2,1 strateginya untuk menjaga kestabilan agar tidak terus menurun. Sebaliknya, pada provinsi dengan TFR yang masih jauh di atas target nasional (2,1), strateginya untuk menurunkan angka kelahiran secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi wilayah (tidak harus langsung mencapai 2,1). Agar kebijakan ini tepat sasaran, secara berkala akan dilakukan proyeksi kelahiran di setiap provinsi untuk melihat mana yang perlu menjaga tingkat kelahirannya dan mana yang masih harus diturunkan, dengan tetap menjadikan TFR 2,1 sebagai acuan nasional;
 - c. Mengkapitalisasi Bonus Demografi. Agar bonus demografi dapat secara maksimal berdampak bagi kesejahteraan penduduk dan pembangunan nasional maka perlu dikembangkan dan dikoordinasikan kebijakan kependudukan yang komprehensif yang mampu mengoptimalkan potensi penduduk usia produktif dan usia lanjut dalam mengelola perekonomian mereka yang dapat berdampak pada perekonomian nasional.
3. Fokus yang ketiga adalah Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif. Perspektif yang pertama merupakan bagian dari hak asasi manusia (hak

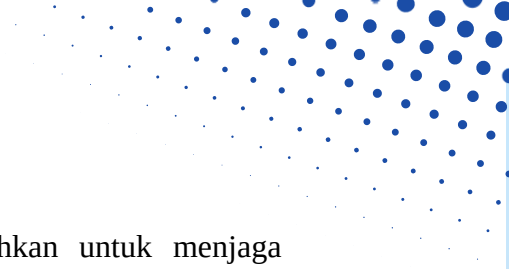


reproduksi dan keluarga berencana berbasis hak) yang harus dijamin oleh negara, hal ini diperkuat dengan adanya piagam hak asasi manusia secara internasional yang diadopsi oleh Indonesia di mana Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) merupakan hak dasar manusia untuk menentukan kehidupan reproduksinya. Perspektif yang kedua dari sudut pandang bahwa keluarga berencana merupakan investasi yang dapat memberikan manfaat finansial (penghematan) pada pembangunan nasional berkelanjutan, khususnya pembiayaan pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Rujukan utama Peraturan Perundangan Nasional terkait dengan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengamanatkan bahwa upaya kesehatan keluarga berencana ditujukan untuk mengatur kehamilan, membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung pelaksanaan Fokus Utama Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) sebagaimana ditetapkan oleh Kemendukbangga/BKKBN, dengan menempatkan KBKR sebagai pemenuhan hak asasi manusia sekaligus sebagai investasi strategis pembangunan. Dalam implementasinya di daerah, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan terpenuhinya hak kesehatan reproduksi bagi seluruh penduduk, khususnya perempuan dan remaja, melalui penyediaan layanan KBKR yang adil, aman, bermutu, serta berlandaskan prinsip *informed choice*.

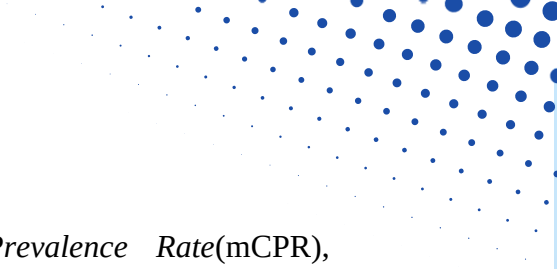
Dalam kerangka kebijakan nasional, program Keluarga Berencana



dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) diarahkan untuk menjaga tingkat fertilitas agar berada pada replacement level, yaitu Total Fertility Rate (TFR) 2,1 secara nasional. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan target TFR sebesar 1,83 pada periode 2025–2029. Oleh karena itu, pelaksanaan program KBKR di Daerah Istimewa Yogyakarta difokuskan pada upaya mempertahankan tingkat fertilitas sesuai target daerah guna mendukung terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2045.

Pengendalian fertilitas tersebut dilaksanakan melalui penguatan akses dan pemanfaatan metode kontrasepsi modern, peningkatan mutu konseling ber-KB, penyediaan layanan KB pascapersalinan dan pascakeguguran, pencegahan kehamilan berisiko, serta penanganan kehamilan pada remaja. Selaras dengan kebijakan nasional yang menempatkan KBKR sebagai instrumen strategis dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan bahwa implementasi KBKR tidak semata-mata berorientasi pada pelayanan kontrasepsi, tetapi juga mencakup peningkatan literasi kesehatan reproduksi, penguatan kesiapan remaja, pendampingan calon pengantin, peningkatan kesehatan ibu hamil, serta perawatan pascapersalinan. Berbagai intervensi tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap percepatan penurunan *stunting* di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui optimalisasi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), khususnya dalam pencegahan kehamilan dengan risiko empat terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak).

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta turut mendukung pencapaian indikator SDGs yang terkait dengan kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender. Dukungan ini meliputi



peningkatan *Modern Contraceptive Prevalence Rate*(mCPR), penurunan Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15–19), peningkatan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan, serta peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi.

Dalam rangka memperkuat kontribusi KBKR sebagai investasi pembangunan, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong integrasi layanan KBKR dengan layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan PKB/PLKB. Selain itu, pemanfaatan data keluarga, hasil pendataan, dan indikator KBKR digunakan sebagai dasar dalam pemetaan wilayah prioritas serta penentuan intervensi yang tepat sasaran untuk meningkatkan efektivitas program.

Perubahan status kelembagaan BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan keluarga, kependudukan, serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Menyikapi hal ini, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan transformasi fokus program dari perencanaan keluarga berencana individual menjadi perencanaan berbasis komunitas serta pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga yang lebih komprehensif. Dengan koordinasi lintas sektor yang optimal, pelaksanaan program Bangga Kencana dan KBKR di Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan keberlanjutan pembangunan, sehingga pencapaian program dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

I.2 Potensi dan Permasalahan

A. Potensi dan Peluang

1. Dukungan terhadap Kebijakan Berbasis Data dan Bukti (*Evidence-based Policy*)

Ketersediaan data mikro keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA), Pendataan Keluarga dan Pemutakhirannya, serta Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Berisiko *Stunting* (Verval KRS) menjadi modal utama dalam mendukung indikator Renstra terkait kualitas kebijakan kependudukan, pengendalian penduduk, dan pembangunan keluarga. Data tersebut berpotensi dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung perumusan kebijakan, penajaman sasaran program, serta monitoring dan evaluasi capaian indikator strategis Renstra 2025–2029.

2. Penguatan Peran Data dan TI dalam Efektivitas Penyelenggaraan Program Bangga Kencana

Tim Kerja Data dan Teknologi Informasi berpotensi memperkuat pencapaian sasaran meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Program Bangga Kencana melalui penyediaan data yang akurat, tepat waktu, dan terintegrasi.

3. Pemanfaatan Inovasi *Digital* untuk Peningkatan Jangkauan dan Partisipasi Masyarakat

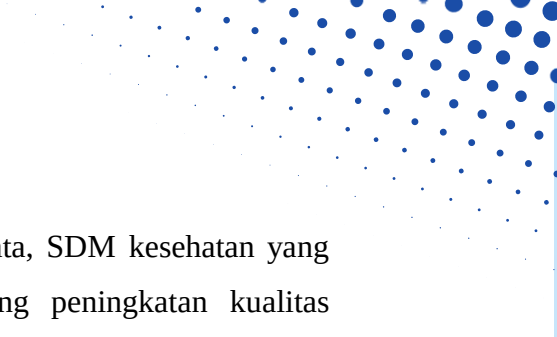
Perkembangan teknologi *digital* memberikan peluang untuk mendukung sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat yang merata dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana. Pengembangan inovasi layanan *digital*, sistem informasi edukatif, dan pemanfaatan media *digital* dapat memperluas jangkauan komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai segmentasi sasaran Renstra 2025–2029.

4. Dukungan Kebijakan Nasional terhadap Penguatan Data dan

Transformasi *Digital*

Arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan Renstra Kemendukbangga/BKKBN 2025–2029 secara tegas menempatkan data dan teknologi informasi sebagai instrumen utama dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Hal ini membuka peluang besar bagi Tim Kerja Data dan Teknologi Informasi untuk berperan lebih strategis dalam mendukung pengambilan keputusan, analisis kebijakan, dan integrasi lintas sektor.

5. Ekosistem Daerah yang Mendukung Inovasi dan Kolaborasi Data
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ekosistem akademik, riset, dan teknologi yang kuat dengan keberadaan perguruan tinggi, pusat riset, serta komunitas teknologi informasi. Kondisi ini memberikan peluang untuk memperkuat kolaborasi pentahelix dalam pengembangan inovasi data, analitik kependudukan, pemanfaatan *big data*, serta pengembangan sistem informasi dan *dashboard* kinerja program Bangga Kencana.
6. Modal Sosial dan Budaya Pendidikan yang Kuat, Kesadaran Kesehatan dan Perencanaan Keluarga Sudah Tinggi, Peluang Reorientasi Program KB: dari Pengendalian ke Kesejahteraan, Infrastruktur Layanan Kesehatan Relatif Baik
DIY dikenal sebagai provinsi dengan tingkat pendidikan relatif tinggi, literasi masyarakat baik, dan budaya diskusi terbuka—ini menjadi modal besar untuk edukasi KB berbasis *evidence* dan konseling yang rasional dan partisipatif. Rendahnya TFR menunjukkan bahwa masyarakat DIY sudah terbiasa merencanakan kehamilan dengan konsep keluarga kecil, kualitas anak, dan kesiapan ekonomi yang telah diterima baik oleh masyarakat. Hal ini menjadi peluang untuk menggeser fokus dari kuantitas ke kualitas keluarga dan reproduksi sehat. DIY memiliki jejaring Puskesmas



dan fasilitas kesehatan yang cukup merata, SDM kesehatan yang relatif kompeten, yang menjadi peluang peningkatan kualitas konseling KB, layanan MKJP dan integrasi KB dengan layanan KIA, *stunting*, dan gizi.

7. Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Perwakilan BKKBN DIY telah menerapkan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sejak tahun 2022. Dalam rangka pelaksanaan SMAP Perwakilan BKKBN DIY telah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan anti penyuapan bagi seluruh pegawai dan mitra kerja. Standar ini mengatur tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, melaporkan dan menangani praktik penyuapan pada organisasi. Penerapan standar tersebut menjadi potensi yang bernilai positif bagi Perwakilan BKKBN DIY untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan organisasi, mencegah dan mendeteksi penyuapan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, meminimalisir risiko *fraud*, dan memperkuat budaya organisasi yang berintegritas.

8. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)

Sebagai implementasi dari Desain Besar Pembangunan Kependudukan yang telah disusun oleh Bappenas, DIY telah menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) untuk periode tahun 2025-2029. PJPK tersebut bertujuan sebagai panduan dalam mengatasi segala dinamika kependudukan yang saat ini terjadi. Kolaborasi dan sinergitas lintas sektor dalam menghadapi segala permasalahan yang ada tertuang dalam dokumen PJPK tersebut. PJPK berisi analisis situasi kependudukan dan juga rencana aksi yang terbagi dalam 5 (lima) sasaran pembangunan kependudukan, yaitu Pengelolaan Kuantitas Penduduk, Peningkatan



Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, dan Penataan Administrasi Kependudukan. Dengan adanya PJPk diharapkan mampu menciptakan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing serta memiliki ketahanan keluarga yang kuat untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

9. SDM Eksternal Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Sumber daya manusia di luar struktur ASN BKKBN yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program, antara lain: Kader KB, Kader PPKBD dan Sub-PPKBD, Penyuluh KB Non-PNS, Tenaga pendamping keluarga (TPK), Mitra lembaga swadaya masyarakat, Mitra perguruan tinggi, organisasi profesi, dan dunia usaha serta Relawan dan tokoh masyarakat. Keberadaan SDM eksternal ini menjadi ujung tombak pelayanan dan edukasi masyarakat, sehingga kualitas kompetensinya sangat menentukan keberhasilan program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Potensi terwujudnya SDM Eksternal dalam pelaksanaan program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berkualitas di DIY, dapat dipertimbangkan dengan melihat adanya:

- 1) Modal Sosial dan Budaya DIY yang Kuat. DIY dikenal memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, budaya gotong royong, serta kepemimpinan lokal yang kuat;
- 2) Tingkat Pendidikan dan Literasi yang Relatif Tinggi. DIY sebagai kota pendidikan memiliki: a) Akses luas terhadap perguruan tinggi dan pusat pelatihan; b) SDM eksternal dengan kemampuan literasi yang baik; c) Kesiapan mengikuti pelatihan berbasis modul, *digital*, maupun *blended learning*.

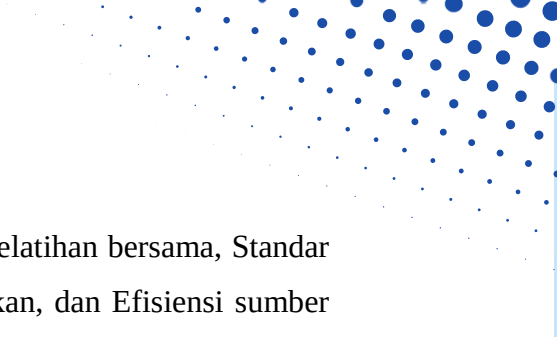
Kondisi ini memudahkan proses pengembangan kompetensi

untuk memenuhi standar kompetensi nasional maupun daerah.

- 3) Ketersediaan Jejaring Kelembagaan dan Kemitraan. Terdapat potensi besar dari: a) Perguruan tinggi dan lembaga riset; b) Organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan; c) Pemerintah daerah dan OPD terkait. Jejaring ini membuka peluang pelaksanaan pengembangan kompetensi secara kolaboratif dan berkelanjutan.
- 4) Pengalaman Implementasi Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. SDM eksternal di DIY sebagian besar telah memiliki: a) Pengalaman lapangan yang panjang; b) Pemahaman kontekstual masyarakat lokal; c) Kedekatan sosial dengan sasaran program. Pengalaman ini menjadi modal dasar penting yang dapat diperkuat melalui pelatihan terstandar.

Peluang Pengembangan Kompetensi SDM Eksternal di DIY:

- 1) Dukungan Kebijakan dan Regulasi. Adanya komitmen nasional dan daerah terhadap: a) Pembangunan SDM; b) Penurunan *stunting*; c) Penguatan ketahanan keluarga. Memberikan legitimasi dan peluang pembiayaan bagi pengembangan kompetensi SDM eksternal.
- 2) Transformasi *Digital* dan Inovasi Pembelajaran. Pemanfaatan Platform pembelajaran *online*, Sistem Informasi dan Data (termasuk SIGA), Media *digital* untuk KIE, memungkinkan peningkatan persentase SDM eksternal yang mengikuti pengembangan kompetensi, tanpa terkendala ruang dan waktu.
- 3) Integrasi Program Lintas Sektor. Isu program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga berkaitan erat dengan masalah Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Integrasi lintas sektor membuka



peluang untuk penyelenggaraan Pelatihan bersama, Standar kompetensi yang saling menguatkan, dan Efisiensi sumber daya pelatihan.

10. Peningkatan Kinerja Penyuluh KB

Kinerja Penyuluh KB/PLKB di lapangan memiliki peran yang sangat strategis dan berdampak langsung terhadap pencapaian target kinerja organisasi BKKBN. Penyuluh KB merupakan ujung tombak pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) karena berhadapan langsung dengan keluarga, kelompok sasaran, serta masyarakat di wilayah binaannya. Kedekatan Penyuluh KB/PLKB dengan masyarakat memungkinkan proses komunikasi, informasi, dan edukasi program Bangga Kencana dapat disampaikan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Selain itu, Penyuluh KB/PLKB memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan peran pendampingan keluarga melalui berbagai kegiatan lapangan, seperti pembinaan kelompok kegiatan (Poktan), pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta koordinasi lintas sektor di tingkat desa atau kelurahan. Peran tersebut sangat mendukung upaya percepatan penurunan *stunting*, peningkatan kualitas keluarga, serta penguatan ketahanan keluarga. Kinerja Penyuluh KB/PLKB yang optimal juga berkontribusi pada peningkatan capaian indikator kinerja utama BKKBN, baik di bidang pelayanan KB, pembangunan keluarga, maupun pengendalian penduduk. Dengan dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas, serta pemanfaatan teknologi informasi, potensi dan peluang kinerja Penyuluh KB/PLKB di lapangan dapat semakin dimaksimalkan. Hal ini akan memperkuat efektivitas pelaksanaan Program Bangga Kencana serta memastikan tercapainya target kinerja organisasi BKKBN secara berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.

11. Sinergi Kelompok Kegiatan (Poktan) dalam Pemberdayaan Keluarga

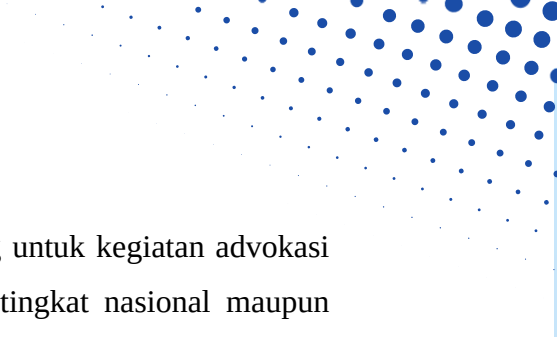
Tersedianya kelompok kegiatan (*poktan*) hingga Tahun 2025 menjadi elemen penting dalam penguatan Program Bangga Kencana di Daerah Istimewa Yogyakarta. Poktan tersebut mencakup Bina Keluarga Balita (BKB) sebanyak 1.529 kelompok dengan 680 diantaranya adalah kelompok BKB Holistik Integratif (HI), Bina Keluarga Remaja (BKR) sebanyak 636 kelompok dengan 254 kelompok masuk dalam kategori Pro PN, Bina Keluarga Lansia (BKL) sebanyak 815 kelompok, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) mencapai 446 kelompok, dengan 322 di antaranya merupakan PIK-R Pro PN yang telah memenuhi standar pengembangan dan layanan yang lebih komprehensif, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) sejumlah 1.381 kelompok sebagai wadah pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

12. Pusat Konsultasi dan Konseling Keluarga yang Adaptif

Tersedianya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Kencana (Satyagatra Kencana) di Perwakilan sebagai layanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat untuk konsultasi dan konseling baik secara *online* maupun tatap muka. Keberadaan Satyagatra juga merupakan bentuk upaya dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) dan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) agar menjadi lembaga yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Jumlah Satyagatra mencapai 66 dan telah diakses sebanyak 6.909 orang sepanjang tahun 2025.

13. iBangga sebagai Instrumen Advokasi Strategis dan Alat Ukur Keberhasilan Pembangunan Keluarga

Tersedianya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan keluarga berperan



penting dalam menyediakan data dukung untuk kegiatan advokasi kepada para pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah. Pada Tahun 2025, nilai iBangga Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada peringkat ke-6 secara nasional dengan capaian 64,8, melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 62,4.

14. Pengembangan Layanan Edukasi Berbasis *Digital*

Teknologi *digital* memberikan peluang untuk memperluas jangkauan promosi dan edukasi kesehatan reproduksi dan seksual, gizi, *life skill*, dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, calon pengantin, dan orangtua yang memiliki remaja melalui *website* dan media sosial (melalui aplikasi/*website* Genre Indonesia, Siap Nikah, Elsimil, serta kelas edukasi yang dilakukan secara *online* seperti Kelas Pranikah dan Kelas Orang Tua Bersahabat dengan Remaja (BERSAHAJA), Kelas Orang Tua Hebat (Kerabat) yang telah dilakukan secara konsisten satu bulan sekali.

15. Pengembangan Model Integrasi Pengasuhan Yogyakarta Responsif *Stunting* (MIAYENI)

Model Integrasi Pengasuhan Yogyakarta Responsif *Stunting* (MIAYENI) memberikan peluang besar untuk memperluas sosialisasi pengasuhan 1.000 HPK secara lebih terstruktur dan terintegrasi, sekaligus meningkatkan partisipasi ayah dan ibu dalam pengasuhan holistik yang mencakup aspek gizi, kesehatan mental, dan literasi *digital*. Model ini memiliki potensi untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mengintegrasikan nilai budaya lokal, serta mengoptimalkan pemanfaatan media *digital* dan kanal komunikasi masyarakat. Dengan pendekatan yang responsif dan kontekstual, MIAYENI berpeluang menjadi model rujukan yang mudah direplikasi di berbagai wilayah, mendorong perubahan perilaku pengasuhan, serta mendukung percepatan penurunan *stunting* di



Daerah Istimewa Yogyakarta.

16. Pendekatan Pembangunan Inklusif dalam Penguatan Pembangunan Manusia

Pembangunan inklusif merupakan pendekatan pembangunan yang menjamin akses, partisipasi dan manfaat pembangunan bagi seluruh individu dan kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Pendekatan ini menjadi landasan dalam penguatan program pembangunan manusia dengan memastikan keterjangkauan layanan, informasi, dan ruang partisipasi bagi kelompok sasaran, termasuk kelompok miskin, marjinal, penyandang disabilitas serta masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses geografis. Pelaksanaan pembangunan manusia dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan berkeluarga dan prinsip inklusivitas, sehingga intervensi program dapat disesuaikan dengan kebutuhan sasaran pada setiap tahapan kehidupan. Pendekatan ini diarahkan untuk mendukung tercapainya pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkeadilan.

17. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Kementerian dan Mitra Kerja

Terjalinnya kerja sama strategis dengan berbagai mitra kerja dalam mendukung penguatan Program Bangga Kencana, antara lain melalui terbitnya Surat Edaran Bersama enam kementerian, yaitu Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait penyelenggaraan Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA); penandatanganan MoU dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sinergi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan dan



implementasi TAMASYA oleh Pertamina Patra Niaga sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial; kolaborasi dengan Indonesia Ramah Lansia (IRL) dan Kementerian Tenaga Kerja dalam pengembangan Lansia *Entrepreneur* sebagai implementasi Perjanjian Kerja Sama antara Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Surakarta dan Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN DIY nomor 2.10/199/LP.00.04/XI/2025 dan 11952/HK.03/J13/2025 tentang Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja melalui Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Sinergitas Program Pembangunan Keluarga yang salah satu sarannya adalah lansia dalam rangka membentuk lansia berdaya melalui kegiatan ekonomi produktif yang disesuaikan dengan kemampuan dan minat lansia; serta penguatan kemitraan dengan perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya dalam pemberdayaan keluarga dan lansia melalui kegiatan ekonomi produktif sesuai kemampuan dan minat mereka.

18. Komitmen dari Pemerintah Daerah dan Mitra Kerja dalam membangun Lansia Tangguh melalui pembentukan Sekolah Lansia Pembangunan ketahanan keluarga salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan Sekolah Lansia dalam rangka membangun lansia agar menjadi tangguh, sehat, dan tetap produktif. Dari tahun 2020-2025 DIY memiliki 29 Sekolah Lansia dari Standar 1 sampai dengan Standar 3 yang terdapat di seluruh kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2025 telah terdapat 1.235 orang peserta Sekolah Lansia di DIY. Guna mendukung Program Kemendukbangga/BKKBN, beberapa wilayah telah mengalokasikan pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Lansia melalui APBD, APBDK/Kel, maupun penganggaran dari mitra kerja lainnya sebagai upaya membentuk lansia tangguh.

B. Permasalahan dan Tantangan

1. Tingkat fertilitas (TFR) yang sangat rendah di bawah *replacement level*

DIY memiliki Total Fertility Rate (TFR) yang rendah — tercatat sekitar 1,83 anak per perempuan pada masa subur, lebih rendah dari rata-rata nasional dan jauh di bawah level pengganti populasi (*replacement level*) 2,1 anak per perempuan. DIY menjadi salah satu provinsi dengan angka kelahiran total terendah di Indonesia.

2. Menurunnya angka kelahiran di DIY dalam beberapa tahun terakhir
DIY mengalami penurunan angka kelahiran yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Dinas Kesehatan DIY menunjukkan bahwa jumlah kelahiran riil mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun sebagai berikut: 38.567 (2021), 36.019 (2022), 35.205 (2023), 32.649 (2024), 26.948 (per November 2025).

3. Implikasi terhadap kebijakan program KB/KR

Trend rendahnya angka kelahiran mengharuskan program KB dan KR tidak hanya fokus pada pemenuhan *Unmet Need*, tetapi juga menyeimbangkan antara intervensi kesehatan reproduksi yang memadai dan kebijakan yang mempertimbangkan konsekuensi demografis jangka panjang, termasuk dukungan terhadap pernikahan usia produktif dan perencanaan keluarga yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Walaupun rendahnya angka fertilitas seringkali dipandang sebagai prestasi program KB, kondisi di DIY menunjukkan bahwa trend tersebut juga memunculkan tantangan baru - khususnya potensi ketidakseimbangan demografis dan tekanan sosial ekonomi jika jumlah generasi muda terus menurun. Untuk itu strategi dan pelaksanaan program KBKR idealnya menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah, DIY dengan kondisi kependudukannya memerlukan program KBKR



yang asimetris, tidak semata-mata disamaratakan dengan kebijakan palugada nasional dan wilayah lain yang masih memerlukan program KB untuk penurunan TFR dan angka kelahiran, tetapi lebih ke arah kualitas.

4. Masih tingginya *Unmet Need* (keluarga yang butuh tetapi tidak memakai kontrasepsi)

Meskipun menurun, persentase *Unmet Need* masih signifikan dan distribusinya berbeda antar kabupaten/kota di DIY. Mitos/ketakutan tentang efek samping menghambat permintaan; membutuhkan komunikasi resiko yang jelas dan tenaga kesehatan terlatih untuk konseling. Tingginya *Unmet Need* meningkatkan angka resiko kehamilan yang tidak diinginkan.

Masih tingginya *Unmet Need* menunjukkan bahwa ada gap dan potensi peningkatan pelayanan KB yang berujung pada peningkatan mCPR dan penurunan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD), sehingga kehamilan yang ada merupakan kehamilan yang benar-benar diinginkan dan direncanakan. Hal ini harus diimbangi dengan peningkatan KIE dan penggerakan oleh lini lapangan, serta peningkatan kualitas konseling KB dan pelayanan KB oleh *provider* KB, sehingga berujung pula pada peningkatan *Method Information Index (MII)*.

5. Kualitas dan Konsistensi Data yang Belum Sepenuhnya Merata

Masih terdapat tantangan dalam menjamin kualitas, kelengkapan, dan konsistensi data keluarga dan kependudukan, terutama pada tingkat kabupaten/kota hingga lini lapangan. Perbedaan kapasitas SDM pengelola data, ketepatan waktu pemutakhiran, serta variasi pemahaman terhadap definisi operasional indikator berdampak pada kualitas data yang digunakan dalam perencanaan dan evaluasi program.

6. Keterbatasan Infrastruktur dan Dukungan Teknologi Informasi di Beberapa Wilayah

Meskipun secara umum infrastruktur TIK di Daerah Istimewa Yogyakarta relatif baik, masih terdapat keterbatasan perangkat, jaringan, dan dukungan teknis di sebagian wilayah atau unit kerja tertentu, khususnya pada tingkat kabupaten/kota dan lini lapangan. Hal ini berpengaruh terhadap kelancaran pengelolaan sistem informasi, pemutakhiran data, dan pelaporan berbasis elektronik.

7. Belum Optimalnya Pemanfaatan Data untuk Penajaman Indikator Sasaran Strategis

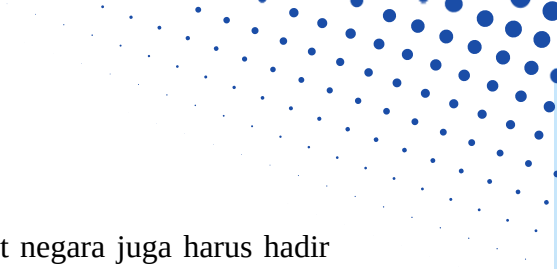
Pemanfaatan data mikro keluarga dan data program untuk analisis mendalam dalam mendukung pencapaian indikator strategis Renstra (seperti pengendalian TFR, penurunan ASFR 15–19, penurunan *Unmet Need*, dan lain sebagainya) belum sepenuhnya optimal. Tantangan ini berdampak pada terbatasnya fungsi data sebagai alat utama dalam penajaman kebijakan dan penentuan prioritas program berbasis kewilayahan.

8. Kapasitas Analitik dan Pemanfaatan Teknologi Lanjutan yang Perlu Diperkuat

Tuntutan pencapaian sasaran Renstra 2025–2029 memerlukan kemampuan analisis data yang lebih komprehensif, termasuk analisis spasial, pemetaan kewilayahan, dan pemodelan demografi. Keterbatasan kapasitas analitik lanjutan dan pemanfaatan teknologi *digital* mutakhir berpotensi membatasi optimalisasi peran data dan TI dalam mendukung sasaran strategis Renstra.

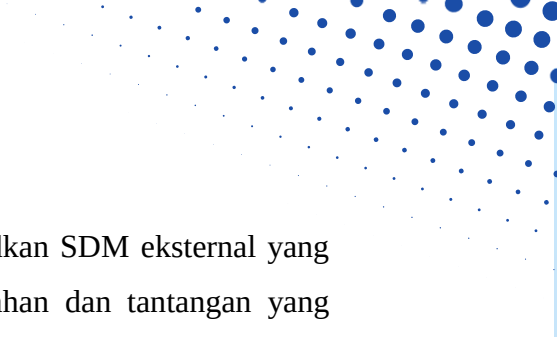
9. Tingginya angka penduduk usia lanjut (lansia)

Jumlah penduduk lansia DIY telah mencapai 17,4% dengan angka harapan hidup rata-rata 75 tahun, menjadikan DIY sebagai provinsi dengan jumlah lansia tertinggi di Indonesia. Keberadaan lansia



menjadi tantangan yang besar, mengingat negara juga harus hadir berperan dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan lansia. Pemerintah DIY telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Tahun 2024-2028 sebagai dasar dalam mewujudkan kesejahteraan lansia. Oleh karena itu, lansia layak mendapatkan pelayanan publik yang lebih inklusif, mulai dari kesehatan, transportasi, hingga ruang sosial yang ramah lansia dengan tetap mengedepankan kolaborasi antar instansi sehingga tujuan dapat tercapai.

10. Kendala Akses dan Keandalan Sistem Pelaporan Berbasis *Website*.
Website-website yang digunakan sebagai sumber data pengukuran indikator kinerja dalam Renstra serta sebagai sarana pelaporan program Kemendukbangga di lapangan, seperti *website* Kampung Keluarga Berkualitas dan Rumah Data Kependudukan, masih sering mengalami kendala akses dan error sistem. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kualitas dan akurasi data yang dihimpun, serta menghambat proses pemutakhiran dan pelaporan data secara berkala. Selain itu, keterbatasan keandalan sistem tersebut berpengaruh terhadap motivasi tenaga lapangan, baik penyuluh maupun kader KB, dalam melakukan pembaruan data dan pelaporan melalui *website*, karena sistem dirasakan sulit diakses dan kurang stabil.
11. Permasalahan dalam terwujudnya SDM Eksternal Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berkualitas
Keberhasilan program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sangat bergantung pada kualitas kompetensi, komitmen, dan kesinambungan peran SDM eksternal tersebut.



Namun demikian, dalam upaya mewujudkan SDM eksternal yang berkualitas, terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang bersifat struktural, teknis, maupun kultural:

- 1) Kesenjangan Kompetensi dan Standar Kualitas. Permasalahan utama adalah belum meratanya kompetensi SDM eksternal di seluruh wilayah DIY. Hal ini ditandai dengan: Perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman; Pemahaman yang belum seragam terhadap kebijakan dan standar program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; dan Variasi kualitas pelaksanaan tugas di lapangan. Kondisi ini menyulitkan upaya standarisasi kinerja SDM eksternal.
- 2) Keterbatasan Akses dan Intensitas Pengembangan Kompetensi. Tidak semua SDM eksternal memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi, akibat: Keterbatasan kuota pelatihan, Keterbatasan anggaran dan Jadwal pelatihan yang belum sepenuhnya menyesuaikan kondisi SDM lapangan. Akibatnya, persentase SDM eksternal yang mengikuti pengembangan kompetensi belum optimal.
- 3) Tingginya Tingkat Pergantian (*Turnover*) SDM Eksternal. SDM eksternal sebagian besar bersifat sukarela atau semi-profesional, sehingga: Rentan terhadap pergantian personel, Komitmen jangka panjang sulit dipertahankan, dan Investasi pelatihan tidak selalu berkelanjutan. Hal ini berdampak pada kontinuitas kualitas layanan program.
- 4) Beban Kerja yang Tinggi dan Peran Ganda. Banyak SDM eksternal memiliki: Tugas utama lain (pekerjaan, keluarga, kegiatan sosial), Beban administrasi dan pelaporan yang meningkat. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan waktu untuk mengikuti pengembangan kompetensi secara optimal.



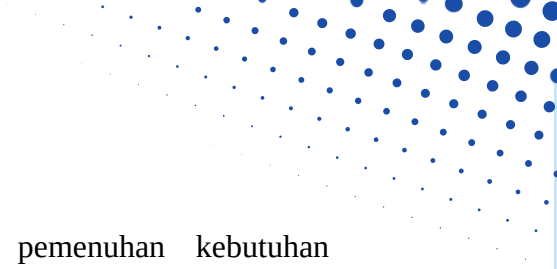
5) Kualitas Data dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Permasalahan juga muncul dalam: a) Penguasaan teknologi informasi dan sistem data (misalnya SIGA); b) Konsistensi dan akurasi pencatatan dan pelaporan; c) Pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan dan intervensi. Ketimpangan literasi *digital* menjadi tantangan tersendiri, khususnya pada SDM eksternal tertentu.

12. Banyaknya portal pelaporan dan aplikasi dalam pelaksanaan program kerja di lapangan menimbulkan kompleksitas dalam proses pencatatan dan pelaporan kegiatan

Penyuluh KB/PLKB sebagai ujung tombak di lapangan menjadi pelaksana seluruh program dari setiap program yang digalakkan. Setiap pengampu program di tingkat Provinsi maupun Pusat memiliki portal pelaporan/aplikasi masing-masing, hal ini menjadi permasalahan di lapangan, karena terlalu banyak data yang harus dilaporkan pada portal/aplikasi yang berbeda-beda. Akan menjadi lebih efisien jika semua pelaporan itu dilaporkan melalui satu portal/aplikasi yang sama, sehingga akan memudahkan Penyuluh KB/PLKB dalam melaporkan setiap kegiatan di lapangan.

13. Jumlah Penyuluh KB/PLKB Berkurang

Jumlah Penyuluh KB/PLKB yang akan purna tugas dalam 3 (tiga) tahun kedepan adalah sebanyak 52 orang. Semakin berkurangnya jumlah Penyuluh KB/PLKB ini menjadi tantangan bagi pimpinan instansi dalam mempertahankan jumlah Penyuluh KB/PLKB di lapangan yang mendukung program kependudukan dan pembangunan keluarga di masyarakat. Berkurangnya jumlah Penyuluh KB/PLKB akibat purna tugas tersebut berimplikasi pada terjadinya kekurangan sumber daya manusia di lapangan, yang berpotensi menghambat optimalisasi pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga. Oleh karena itu,

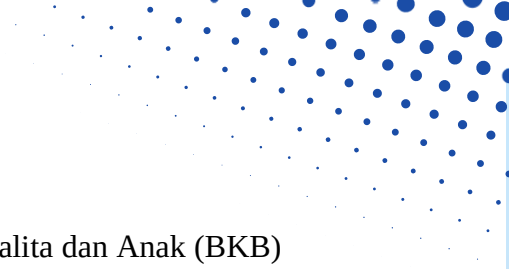


diperlukan langkah strategis berupa pemenuhan kebutuhan Penyuluh KB/PLKB melalui penyiapan dan pengadaan tenaga pengganti yang kompeten, memiliki kapasitas teknis, serta memahami karakteristik wilayah dan masyarakat binaan. Ketersediaan Penyuluh KB/PLKB yang berkualitas menjadi faktor kunci dalam menjaga kesinambungan program, meningkatkan kinerja layanan, serta memastikan pencapaian target kinerja organisasi secara berkelanjutan.

14. Belum optimalnya partisipasi lansia dalam SIDAYA (*Active ageing*) di DIY

Pemberdayaan lansia agar tetap sehat, mandiri, produktif, dan bermartabat dilakukan melalui Program Sidaya dengan mengoptimalkan peluang kesehatan fisik, mental, serta partisipasi sosial. Akan tetapi, karena faktor fisiologis, psikologis, sosial, dan ekonomi menyebabkan partisipasi lansia dalam Sidaya (*active ageing*) menjadi belum optimal. Lansia sering kali mengalami penurunan kemampuan fisik dan keterbatasan mobilitas, yang dapat menghalangi lansia untuk mengikuti kegiatan di luar rumah. Lansia juga pada umumnya kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri serta merasa terisolasi. Selain itu, banyak lansia yang menjalankan rutinitas kegiatan di sektor domestik, sehingga kurang terlibat dalam kegiatan sosial-ekonomi yang produktif. Hal ini berpengaruh pada kemauan dan kemampuan lansia berpartisipasi dalam pemeriksaan kesehatan sebagai upaya deteksi dini penyakit tidak bergejala secara rutin setiap bulan, mengurangi keinginan untuk terlibat dalam aktivitas Sekolah Lansia, maupun dalam kegiatan ekonomi produktif dalam membentuk lansia *entrepreneur*. Yang mana hal-hal tersebut merupakan bagian dari upaya pembentukan lansia berdaya.

15. Keterbatasan Cakupan dan Jangkauan Program BKB



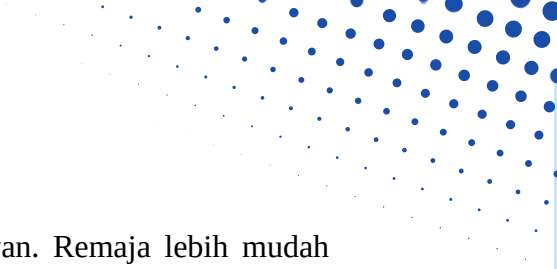
Cakupan layanan kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak (BKB) masih terbatas. Dari total 188.557 keluarga sasaran yang memiliki anak usia dini, jumlah BKB yang tersedia baru mencapai 1.529 kelompok, dengan 38.883 keluarga yang mengikuti kegiatan BKB. Artinya, tingkat partisipasi keluarga dalam BKB baru mencapai 20,62% dari keseluruhan sasaran. Selain itu, sebagian besar BKB beroperasi di tingkat padukuhan, sehingga jangkauannya masih sempit dan belum mampu menjangkau keluarga sasaran dalam cakupan yang lebih luas

16. *Fatherless* sebagai Tantangan Penguatan Peran Ayah dalam Pengasuhan

Fenomena *fatherless* merupakan tantangan strategis dalam penguatan peran ayah pada pengasuhan anak yang berdampak pada tumbuh kembang anak dan kesejahteraan keluarga. Menurut hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2025, sekitar 25,8% anak di Indonesia mengalami *fatherless* dengan indikator interaksi, aksesibilitas, tanggung jawab dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Dari 30,83 juta anak usia dini di Indonesia, sekitar 2.999.577 anak kehilangan sosok ayah. Kondisi tersebut memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan yang terarah, mengingat peran ayah memiliki kontribusi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, pembentukan karakter anak serta ketahanan keluarga. Oleh karena itu, penguatan keterlibatan ayah dalam pengasuhan menjadi bagian strategis dalam upaya mewujudkan keluarga yang sehat, harmonis, dan berdaya.

17. Perlunya metode khusus untuk menjangkau remaja dalam upaya edukasi dan promosi program terkait ketahanan remaja

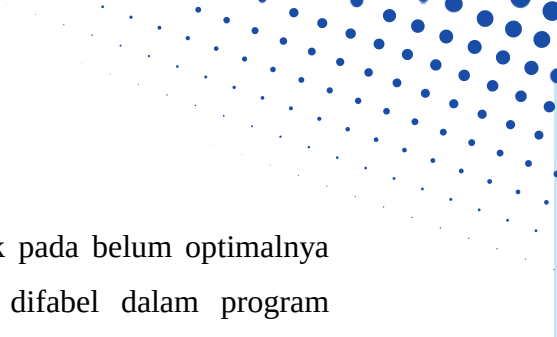
Remaja berada pada fase pencarian jati diri, sensitif terhadap penilaian sosial, dan cenderung menolak pendekatan yang menggurui. Metode konvensional (ceramah satu arah) sering



dianggap membosankan atau tidak relevan. Remaja lebih mudah menerima pesan dari teman sebaya dibandingkan orang dewasa atau otoritas. Tanpa pendekatan yang sesuai, pesan ketahanan remaja mudah diabaikan. Di sisi lain, remaja menghadapi berbagai isu yang semakin kompleks dan multidimensional, antara lain kesehatan mental, perundungan, adiksi gawai, kekerasan, serta tekanan akademik dan sosial. Isu-isu tersebut memerlukan pendekatan edukasi yang kontekstual, partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan remaja. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara desain program pemerintah dengan realitas kehidupan remaja, di mana program sering dipersepsikan kaku, kurang menggunakan bahasan dan media yang sesuai dengan budaya remaja serta belum sepenuhnya hadir di ruang interaksi *digital* yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari remaja.

Selain itu, remaja memiliki tingkat mobilitas yang tinggi karena aktivitas yang beragam, seperti sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, keikutsertaan dalam organisasi, pekerjaan paruh waktu, serta kegiatan pergaulan sosial sehari-hari, yang secara keseluruhan membuat waktu dan keberadaan remaja sulit diseragamkan dalam satu jadwal kegiatan. Remaja sendiri merupakan kelompok usia yang sangat aktif secara sosial dan berada pada fase transisi penting, sehingga memerlukan pendekatan edukasi dan promosi program yang adaptif, kontekstual serta sesuai dengan dinamika kehidupan remaja agar efektivitas penyampaian dan penerimaan pesan program ketahanan remaja dapat tercapai secara optimal.

Selain tingginya mobilitas remaja, tantangan strategis dalam pelaksanaan program ketahanan remaja adalah keterbatasan fasilitator atau pendidik sebaya. Padahal pendekatan *peer education* terbukti efektif dalam menjangkau dan meningkatkan penerimaan pesan pada remaja. Keterbatasan ini semakin nyata pada remaja berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas akibat minimnya fasilitator yang memiliki kompetensi inklusif dan keterampilan



komunikasi adaptif, sehingga berdampak pada belum optimalnya keterjangkauan dan partisipasi remaja difabel dalam program ketahanan remaja.

18. Keterbatasan Anggaran Pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan)

Tidak adanya kecukupan anggaran untuk pembinaan kelompok kegiatan (poktan) menyebabkan pendampingan, penguatan kapasitas, serta pelaksanaan aktivitas rutin di tingkat poktan tidak dapat berjalan optimal. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kualitas layanan, rendahnya konsistensi pertemuan, serta kurangnya kemampuan poktan dalam mengembangkan inovasi dan menjangkau sasaran secara lebih luas.

19. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Penyelenggaraan Program

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik PKB/PLKB maupun kader KB, masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Permasalahan ini mencakup kurangnya jumlah tenaga yang tersedia serta keterbatasan kompetensi, khususnya terkait kemampuan pemanfaatan teknologi *digital* yang semakin dibutuhkan dalam penyelenggaraan program dan layanan keluarga.

20. Tantangan Digitalisasi dalam Pelaksanaan dan Pelaporan Program

Penggunaan teknologi *digital* dalam pelaksanaan dan pelaporan program masih menghadapi berbagai kendala, antara lain akses internet yang belum merata di sejumlah wilayah, keterbatasan perangkat teknologi informasi yang dimiliki pelaksana program, serta gangguan pada aplikasi yang menyebabkan proses input data, pemantauan, dan pelaporan menjadi terhambat atau tidak dapat dilakukan. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pelaporan, rendahnya kualitas data, serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi *digital* dalam mendukung efektivitas program.



BAB II

**KETERKAITAN TERHADAP VISI, MISI, DAN TUJUAN
KEMENDUKBANGGA/BKKBN, SERTA SASARAN
PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT**



BAB II

KETERKAITAN TERHADAP VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENDUKBANGGA/BKKBN, SERTA SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/RINCIAN *OUTPUT*

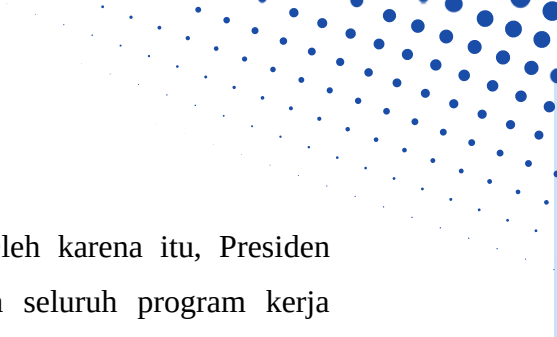
II.1 Keterkaitan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung Visi Kemendukbangga/BKKBN

Sesuai dengan arahan Presiden kepada seluruh Kementerian dan Lembaga, Kemendukbangga/BKKBN tidak membuat visi dan misi tersendiri namun mendukung visi dan misi Presiden. Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Dalam mendukung Visi Presiden RI 2025 – 2029 sebagaimana tertera di atas maka formulasi dukungan Kemendukbangga/BKKBN terhadap Visi Presiden adalah “Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Berkualitas untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Peran Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung “Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Berkualitas untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” melalui “Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan KB, Kualitas Kebijakan Kependudukan dan Pengendalian Penduduk serta Kualitas Pembangunan Keluarga”.

II.2 Keterkaitan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung Misi Kemendukbangga/BKKBN

Untuk mewujudkan arah pembangunan nasional yang telah ditetapkan,

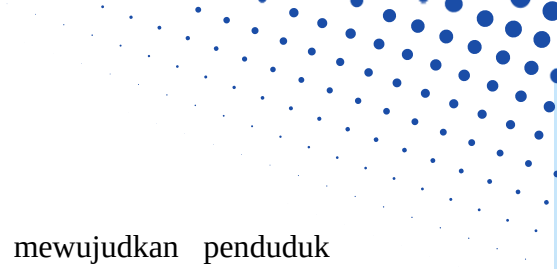


diperlukan panduan yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, Presiden menetapkan visi yang menjadi pijakan utama seluruh program kerja pemerintahan. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi, politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

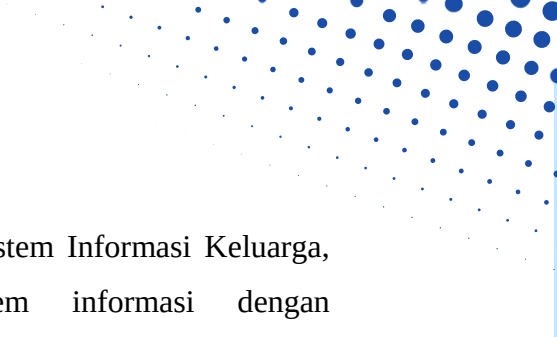
Untuk mendukung Misi Presiden di atas maka formulasi Misi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN adalah “Mendukung Misi Presiden melalui Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga”, melalui:

1. Memperkuat sinergitas kebijakan pengendalian kependudukan untuk

- 
- mengendalikan pertumbuhan penduduk, mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas, serta pembangunan yang berwawasan kependudukan;
2. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup dalam meningkatkan kualitas keluarga;
 3. Menyelenggarakan dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB dan KR) secara komprehensif;
 4. Memperkuat analisis kebijakan, sistem informasi dan data keluarga yang berkualitas dan terintegrasi, serta meningkatkan inovasi teknologi informasi, komunikasi, dan edukasi program Bangga Kencana;
 5. Meningkatkan jejaring kemitraan, peran serta masyarakat, tenaga lini lapangan, dan kerja sama global; dan
 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan, pengembangan kompetensi, dan pengelolaan SDM aparatur, serta pengawasan dan pembinaan di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN.

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan Misi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui:

1. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan dalam RPJPD, RPJMD melalui penyusunan serta pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
2. Merancang, menyiapkan dan melakukan kegiatan terkait pembangunan keluarga berbasis siklus hidup dengan mengoptimalkan kelompok kegiatan,
3. Meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana melalui mengoptimalkan seluruh fasilitas kesehatan untuk bekerjasama dengan BKKBN dalam pelayanan KB dan meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana serta ketersediaan kontrasepsi,
4. Melakukan kajian serta pemanfaatan hasil pemutakhiran pendataan



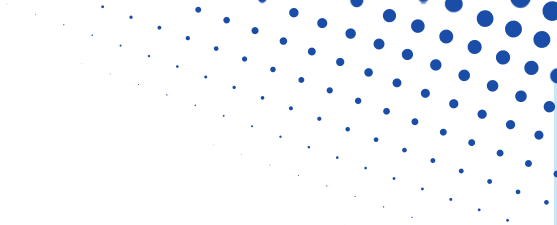
keluarga, pengelolaan dan optimalisasi Sistem Informasi Keluarga, pengembangan *dashboard* dan sistem informasi dengan mengoptimalkan *website* dan mengoptimalkan media sosial resmi untuk kampanye program Bangga Kencana,

5. Penguatan kerjasama dengan pemerintah daerah, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, organisasi sosial, sektor swasta dan pemberdayaan kelompok kegiatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi, edukasi berbasis komunitas,
6. Penguatan struktur dan tata kelola organisasi unit kerja, peningkatan kualitas layanan publik, dan pelatihan teknis program Bangga Kencana serta pengukuran kinerja SDM berbasis target, *output* dan *outcome*.

II.3 Keterkaitan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis Kemendukbangga/BKKBN

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Kemendukbangga/BKKBN memiliki tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang Berkualitas.

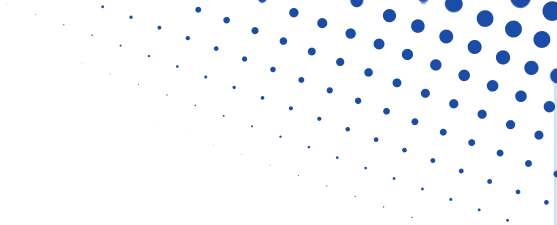
Tujuan strategis nasional ini menjadi landasan dan arah utama bagi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang berkualitas di tingkat provinsi. Pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada sinergi dan kontribusi nyata dari seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa bidang yang memiliki keterkaitan dan peranan penting dalam memastikan tercapainya tujuan strategis melalui kontribusi dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang saling mendukung serta selaras dengan arah dan kebijakan dan prioritas Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029, meliputi Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan



Keluarga, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat, Pusbang SDM, Data dan Teknologi Informasi di Provinsi, Bidang Kebijakan dan Strategi, serta Dukungan Manajemen Provinsi. Sebagai satu kesatuan organisasi, seluruh bidang memiliki keterkaitan yang erat dalam mendukung tujuan dan sasaran strategis Kemendukbangga/BKKBN.

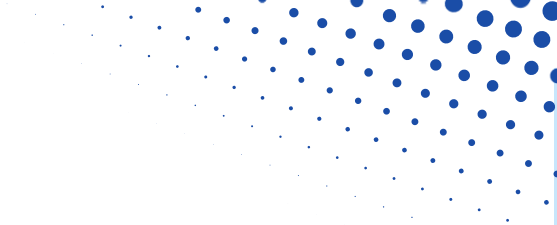
Bidang Pengendalian Kependudukan memiliki keterkaitan strategis dengan tujuan Renstra Kemendukbangga/BKKBN melalui pelaksanaan tugas yang berfokus pada pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), integrasi data kependudukan dalam perencanaan daerah, serta peningkatan kualitas bimbingan teknis dan penyelenggaraan Rumah Data Kependudukan. Seluruh fungsi tersebut menjadi landasan penting bagi pengendalian pertumbuhan penduduk yang terukur dan berbasis bukti, selaras dengan arah kebijakan pembangunan keluarga dan kependudukan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, bidang ini berkontribusi secara operasional melalui pendampingan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan, pembinaan pendidikan kependudukan di berbagai jalur, penguatan sistem peringatan dini pengendalian penduduk, serta pengelolaan dan peningkatan performa Kampung KB. Dengan peran yang terintegrasi tersebut, bidang ini turut memastikan tersedianya data, kebijakan, dan kapasitas daerah yang memadai untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pengendalian penduduk secara efektif dan berkesinambungan dalam Kemendukbangga/BKKBN.

Kerangka tujuan besar Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS/PK) memiliki peran strategis dalam mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas, tangguh, dan berdaya melalui penguatan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pengasuhan, serta percepatan penurunan *stunting*. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui pembinaan pengasuhan anak usia dini, pendampingan keluarga berisiko, penguatan keluarga rentan melalui Satyagraha, fasilitasi



program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, serta Bina Keluarga Remaja (BKR). Bidang ini juga memastikan intervensi pada 1.000 HPK terlaksana secara terarah dan terpadu untuk mendukung percepatan penurunan *stunting*. Selain itu, pelaksanaan GENTING dan MBG memperkuat peran KS/PK dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga berisiko melalui dukungan orang tua asuh dan penyediaan makanan bergizi bagi kelompok rentan. Integrasi kegiatan GENTING dan MBG mendukung terciptanya ketahanan keluarga dari aspek kesehatan, sosial, dan gizi, sehingga memperkuat capaian pembangunan keluarga secara langsung di tingkat yang paling dasar. Secara keseluruhan, Bidang KS/PK berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis Kemendukbangga/BKKBN melalui peningkatan kualitas keluarga, penguatan fungsi pengasuhan, pengendalian risiko kerentanan keluarga, serta percepatan penurunan *stunting* yang menjadi prioritas nasional.

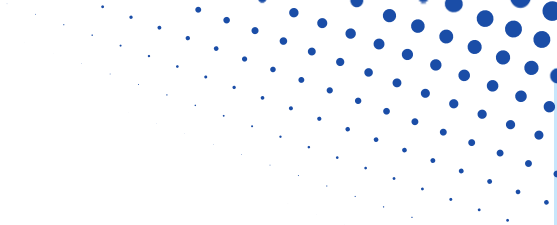
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR) memastikan terselenggaranya pelayanan KB yang bermutu, merata, dan aman serta mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan reproduksi masyarakat. Fungsi utama bidang ini berfokus pada perluasan akses layanan KB, peningkatan standar mutu pelayanan, serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan. Bidang ini juga memastikan peningkatan penggunaan metode kontrasepsi modern, termasuk MKJP, penguatan partisipasi KB pria, penyediaan layanan KB pascapersalinan, serta pencegahan kehamilan berisiko tinggi sebagai strategi pengendalian fertilitas. Selanjutnya, implementasi layanan KB/KR diperkuat dengan adanya pengelolaan dan pembinaan tenaga lini lapangan melalui pembinaan PKB/PLKB, peningkatan kompetensi penyuluh, serta pemberdayaan kader IMP sebagai mitra di tingkat komunitas. Peran tenaga lini lapangan menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan edukasi KB, perubahan perilaku, dan pendampingan keluarga dalam memilih serta menggunakan metode kontrasepsi secara tepat. Penguatan mekanisme operasional dan koordinasi lapangan memastikan seluruh intervensi KB/KR dapat diterima masyarakat



dengan efektif dan konsisten. Bidang KB/KR berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan strategis Kemendukbangga/BKKBN melalui peningkatan akses dan kualitas layanan KB, pengendalian angka kelahiran, serta penguatan kesehatan reproduksi sebagai fondasi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera.

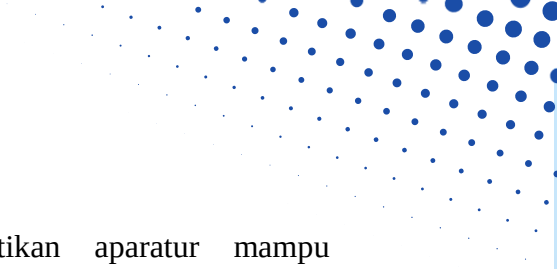
Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat memastikan dukungan, keterlibatan, dan kolaborasi seluruh lapisan masyarakat serta kemitraan lintas sektor dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana. Peran utama bidang ini dijalankan dengan cara memperkuat jejaring kemitraan antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan media massa. Melalui advokasi program yang sistematis, penyusunan materi KIE yang akurat dan berbasis data, serta pemanfaatan berbagai kanal komunikasi, bidang ini meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik terhadap isu kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, serta percepatan penurunan *stunting*. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam dukungan kepada keluarga berisiko *stunting* diperkuat dengan pelaksanaan GENTING dan MBG. Program GENTING memobilisasi tokoh masyarakat, lembaga mitra, dan keluarga asuh untuk memberikan bantuan berkelanjutan, sementara MBG menyediakan asupan gizi kepada kelompok rentan. Kedua program ini memadukan advokasi, edukasi, dan partisipasi langsung masyarakat, sehingga menjadi bagian penting dari strategi penggerakan sosial di tingkat daerah. Secara keseluruhan, Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat berkontribusi besar dalam membangun komitmen, menumbuhkan kepedulian, serta memperluas kolaborasi lintas sektor yang diperlukan untuk mencapai tujuan besar Kemendukbangga/BKKBN, terutama dalam penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pencapaian target Program Bangga Kencana secara berkelanjutan.

Bidang Kebijakan dan Strategi memastikan bahwa seluruh pelaksanaan Program Bangga Kencana di tingkat provinsi berjalan sesuai arah kebijakan nasional serta berorientasi pada pencapaian sasaran kinerja yang terukur.



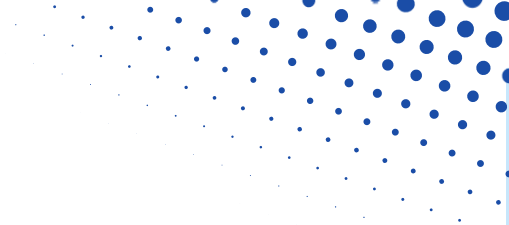
Bidang ini bertanggung jawab atas proses perumusan kebijakan teknis, penyusunan strategi implementasi, serta penyelarasan program dan kegiatan dengan prioritas strategis Kemendukbangga/BKKBN. Melalui fungsi analisis kebijakan, bidang ini memastikan bahwa setiap program dan intervensi memiliki landasan yang kuat, berbasis data, serta relevan dengan dinamika kebutuhan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di daerah. Dalam pelaksanaannya, Bidang Kebijakan dan Strategi mengoordinasikan penyusunan pedoman teknis, rencana aksi, serta integrasi kebijakan lintas bidang untuk menjamin konsistensi dan efektivitas implementasi program. Bidang ini juga menjalankan peran pengawasan strategis melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, sehingga penyimpangan dapat diidentifikasi lebih awal dan kebijakan penyesuaian dapat diterapkan secara cepat dan tepat. Dengan demikian, bidang ini memastikan bahwa setiap upaya pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk berjalan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan optimalisasi hasil. Bidang Kebijakan dan Strategi berkontribusi langsung dalam penguatan tata kelola program, peningkatan kualitas perencanaan, serta penyusunan arah strategis yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan keluarga yang berkualitas dan berkelanjutan di tingkat provinsi.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusbang SDM) memastikan bahwa seluruh pelaksanaan Program Bangga Kencana didukung oleh aparatur dan tenaga pelaksana yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Keterkaitan ini tercermin melalui peran dan kontribusi Pusbang SDM dalam menjalankan fungsi penguatan kapasitas, penjaminan mutu, serta peningkatan tata kelola SDM. Pertama, Pusbang SDM dalam menjalankan perannya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan Kebijakan Strategi, Pelatihan, Peningkatan Kompetensi, Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, serta SPIP yang memiliki kontribusi utama dalam membangun SDM yang unggul. Melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan teknis Program Bangga Kencana, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan integritas dan sistem pengendalian



intern pemerintah, Pusbang SDM memastikan aparatur mampu menjalankan tugas secara profesional, adaptif, dan sesuai standar kebijakan nasional. Kedua, aspek pengelolaan SDM juga diperkuat oleh pelaksanaan fungsi manajemen kepegawaian secara menyeluruh. Mulai dari pengembangan SDM, pembinaan kedisiplinan, administrasi kepegawaian, hingga pengelolaan gaji dan tunjangan. Ini memastikan bahwa seluruh aparatur berada dalam sistem yang tertata, akuntabel, dan mendukung produktivitas kerja. Ketiga, melalui perencanaan dan manajemen kinerja, Pusbang SDM berkontribusi dalam aspek pembinaan kinerja aparatur melalui penetapan indikator, pemantauan capaian, dan evaluasi berbasis data. Mekanisme ini memungkinkan peningkatan kualitas SDM dilakukan secara berkelanjutan dan terukur, selaras dengan arah kebijakan pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk. Secara keseluruhan, ketiga hal tersebut membentuk satu kesatuan terintegrasi yang memperkuat Pengembangan SDM dalam memastikan tersedianya aparatur yang kompeten, berintegritas, serta memiliki standar kinerja yang mendukung pencapaian tujuan strategis Kemendukbangga/BKKBN. Dengan pengelolaan SDM yang efektif, pelaksanaan Program Bangga Kencana dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Data dan Teknologi Informasi di Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta berkaitan dengan penguatan sistem pelaporan, statistik, dan data keluarga merupakan fondasi penting bagi perencanaan yang berbasis bukti, pengambilan keputusan, serta pemantauan kinerja program Bangga Kencana di semua tingkatan. Peran bidang ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan STIK (Sistem Informasi dan Teknologi Komunikasi) yang mendukung proses pengelolaan data, pelaporan, dan integrasi informasi program. Pengelolaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) juga diperkuat untuk memastikan transparansi, keterbukaan informasi publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan program. Selain itu, tim berkontribusi pada peningkatan kualitas cakupan pengelolaan serta pemanfaatan Basis Data Keluarga



Indonesia, yang menjadi sumber data utama bagi perencanaan pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, serta program percepatan penurunan *stunting*. Optimalisasi data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses memungkinkan setiap unit kerja menjalankan fungsi pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pengendalian program secara tepat sasaran. Pelaksanaan fungsi yang terintegrasi ini memperkuat tata kelola data, peningkatan keandalan sistem informasi, serta penyediaan data keluarga yang berkualitas sebagai dasar perumusan kebijakan dan implementasi program Bangga Kencana secara efektif dan berkelanjutan.

Dukungan Manajemen Provinsi memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan Renstra untuk mewujudkan penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang berkualitas. Dukungan yang diberikan mencakup seluruh bidang kerja yang berperan dalam memastikan terselenggaranya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, akuntabel, serta mendukung kelancaran operasional dan pencapaian sasaran strategis Program Bangga Kencana. Unit-unit ini melaksanakan fungsi perencanaan, pengawasan, pengelolaan keuangan, penguatan SDM, pelayanan administratif, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Secara keseluruhan, unit kerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bidang-bidang yang ada di dalamnya saling melengkapi dalam mendukung tujuan Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025–2029 melalui pelaksanaan tugas yang terstruktur, integratif, dan sesuai kewenangan masing-masing. Setiap bidang memberikan kontribusi strategis terhadap upaya peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk, penguatan layanan KB dan kesehatan reproduksi, percepatan penurunan *stunting*, penyempurnaan tata kelola kelembagaan, serta optimalisasi sumber daya dan sistem pendukung program. Sinergi dan kolaborasi seluruh bidang menjadi tumpuan penting bagi terwujudnya program Bangga Kencana yang lebih efektif, berdaya guna, dan berkelanjutan di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.

II.4 Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Rincian *Output* Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk menjamin dukungan Kemendukbangga/BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2025-2029 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2025-2029, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan Kemendukbangga/BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya keberhasilan pembangunan keluarga;
2. Menurunnya angka fertilitas pada remaja usia 15-19 tahun;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan kependudukan dan pengendalian penduduk;
4. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat yang merata dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana; dan
6. Terwujudnya Kemendukbangga/BKKBN yang kolaboratif, kapabel dan berintegritas untuk melayani masyarakat.

Sasaran Strategis Kemendukbangga/BKKBN dapat dicapai melalui kontribusi dari hasil pelaksanaan program baik secara teknis maupun pendukung. Berikut ini adalah uraian sasaran kegiatan serta indikator di bawah lingkup BKKBN Perwakilan Provinsi.

Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi.

1. Bidang Pengendalian Penduduk

a. Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan Kependudukan dan Pengendalian Penduduk.

b. Indikator Sasaran Strategis

- 1) Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK).

c. Sasaran Kegiatan (*Output*)

Meningkatnya integrasi kebijakan kependudukan dalam pembangunan daerah.

d. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

- 1) Persentase Kabupaten/Kota dengan nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di atas nilai Nasional.
- 2) Persentase Kabupaten/Kota dengan klasifikasi nilai Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) minimal kategori "Sedang".

e. Rincian *Output* (RO)/Indikator RO

- 1) Pemerintah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang pengendalian penduduk.
Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang pengendalian penduduk.
- 2) Pemerintah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan Kepedulian terhadap Isu Kependudukan
Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan Kepedulian terhadap Isu Kependudukan.
- 3) Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan penanganan terpadu dampak kependudukan.
Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan penanganan terpadu dampak kependudukan.

2. Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga

a. Sasaran Strategis

- 1) Meningkatnya keberhasilan pembangunan keluarga.
- 2) Menurunnya angka fertilitas pada remaja usia 15-19 tahun.

b. Indikator Sasaran Strategis

- 1) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).
- 2) Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19).

c. Sasaran Kegiatan (*Output*)

Terwujudnya keberhasilan pembangunan keluarga yang merata di Provinsi.

d. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

- 1) Persentase kabupaten/kota dengan capaian ibangga diatas capaian ibangga provinsi.
- 2) Persentase kabupaten/kota dengan capaian angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun dibawah capaian provinsi.

e. Rincian *Output* (RO)/Indikator RO

- 1) Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK.
 - Jumlah Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK.
 - Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten Kota memberikan pendampingan pengasuhan di BKB HI.
- 2) PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja.
 - Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja.
- 3) Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang pembangunan keluarga.
 - Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang pembangunan keluarga.
 - Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten Kota memberikan pendampingan pengasuhan di Tempat Penitipan Anak (TPA).
 - Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan komunitas ayah teladan.
 - Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah.
 - Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi bimbingan teknis pendampingan lansia berdaya.

- Jumlah Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pelayanan keluarga melalui Satyagatra.
- Jumlah kelompok UPPKA yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga.

3. Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi

a. Sasaran Strategis

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan program keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi.

b. Indikator Sasaran Strategis

- 1) Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (*Proportion of Demand Satisfied by Modern Methods*).
- 2) Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan/*Unwanted Pregnancy*.

c. Sasaran Kegiatan (*Output*)

Meningkatnya penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang merata di provinsi.

d. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

- 1) Persentase kabupaten/kota dengan capaian Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern diatas capaian provinsi.
- 2) Jumlah Kabupaten/Kota dengan peserta KB Pascapersalinan mencapai target.

e. Rincian *Output* (RO)/Indikator RO

- 1) Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon.
 - Jumlah Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon.
- 2) Fasilitasi dan pembinaan fasilitas kesehatan yang siap melakukan pelayanan KB.
 - Jumlah Fasilitasi dan pembinaan fasilitas kesehatan yang siap melakukan pelayanan KB.
- 3) Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan peningkatan Peserta KB Aktif penggunaan Kontrasepsi jangka

panjang (MKJP).

- Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan peningkatan Peserta KB Aktif penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
- Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi pelayanan vasektomi.

4) Fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP.

- Jumlah Fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP.

5) Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan KB Pascapersalinan, pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan.

- Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan KB Pascapersalinan, pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan.

6) Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang KBKR.

- Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang KBKR.

4. Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat

a. Sasaran Strategis

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang merata dalam pelaksanaan program Bangga Kencana.

b. Indikator Sasaran Strategis

- 1) Indeks Partisipasi Masyarakat (IPaM) dalam Program Bangga Kencana.

c. Sasaran Kegiatan (*Output*)

Meningkatnya implementasi penggerakan dan peran serta masyarakat dalam program kependudukan, Pembangunan keluarga dan keluarga berencana di Provinsi.

d. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

- 1) Persentase Putus Pakai Alat dan Obat Kontrasepsi.
- 2) Persentase keluarga yang terpapar program bangga kencana.
- 3) Jumlah mitra kerja yang mendukung Program Bangga Kencana.

e. Rincian *Output* (RO)/Indikator RO

- 1) Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam bidang pergerakan dan peran serta Masyarakat.
 - Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam bidang pergerakan dan peran serta masyarakat.
- 2) Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING).
 - Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING).
- 3) Pemerintah daerah yang melaksanakan promosi Program bangga kencana melalui media lini bawah oleh pengelola program, petugas dan kader.
 - Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan promosi Program bangga kencana melalui media lini bawah oleh pengelola program, petugas dan kader.

5. Data dan Informasi di Provinsi

a. Sasaran Kegiatan (*Output*)

Terwujudnya pengelolaan data dan teknologi informasi yang berkualitas di setiap tingkatan wilayah.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

- 1) Persentase pemerintah daerah yang memiliki Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi yang berkualitas.

c. Rincian *Output* (RO)/Indikator RO

- 1) Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA).
 - Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA).
- 2) Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga.
 - Jumlah laporan pelaksanaan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga.

6. Pusbang SDM

a. Sasaran Kegiatan (*Output*)

Terwujudnya SDM Eksternal Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana yang Berkualitas Tingkat Provinsi.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Persentase SDM Eksternal yang mendapatkan pelatihan Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana di Tingkat Provinsi.

c. Rincian *Output* (RO)/Indikator RO

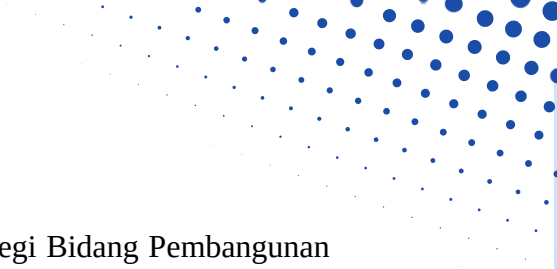
- 1) SDM Eksternal yang mendapatkan pelatihan Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana tingkat provinsi.
 - Persentase SDM Eksternal provinsi yang mendapatkan pelatihan.
 - Persentase peserta pelatihan SDM Eksternal yang lulus dengan kategori memuaskan dan sangat memuaskan.

7. Bidang Kebijakan dan Strategi

a. Sasaran Kegiatan (*Output*)

Terwujudnya Implementasi kebijakan strategi yang termanfaatkan di Tingkat Provinsi.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

- 
- 1) Indeks Implementasi Kebijakan Strategi Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di provinsi.
- c. Rincian *Output* (RO)/Indikator RO
- 1) Implementasi Kebijakan strategi bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di provinsi.
 - Jumlah laporan implementasi Kebijakan strategi bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di provinsi.

Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi

1. Sekretariat

a. Sasaran Strategis

Terwujudnya Kemendukbangga/BKKBN yang Kolaboratif, Kapabel dan Berintegritas untuk Melayani Masyarakat.

b. Indikator Sasaran Strategis

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi.

c. Sasaran Kegiatan (*Output*)

Terwujudnya penyelenggaraan Dukungan manajemen yang berkualitas, serta kebijakan strategi yang termanfaatkan di Tingkat Provinsi.

d. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

- 1) Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen di Tingkat Provinsi.

e. Rincian *Output* (RO)/Indikator RO

- 1) Layanan organisasi dan tata kelola internal.
 - Jumlah Layanan hukum, organisasi dan tata kelola internal yang dilaksanakan.
- 2) Layanan Perkantoran.
 - Jumlah Layanan Perkantoran yang dilaksanakan.

2. Pengawasan

a. Sasaran Kegiatan (*Output*)

Terwujudnya pengelolaan program yang akuntabel dan berintegrasi di Tingkat Provinsi.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1) Indeks Zona Integritas (ZI).

c. Rincian *Output* (RO)/Indikator RO

1) Layanan audit internal.

- Jumlah Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM.

3. Pusbang SDM

a. Sasaran Kegiatan (*Output*)

Terwujudnya SDM internal Kemendukbangga/BKKBN provinsi yang Berkualitas.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1) Persentase SDM internal Kemendukbangga/BKKBN provinsi yang mengikuti pengembangan kompetensi untuk pemenuhan standar kompetensi.

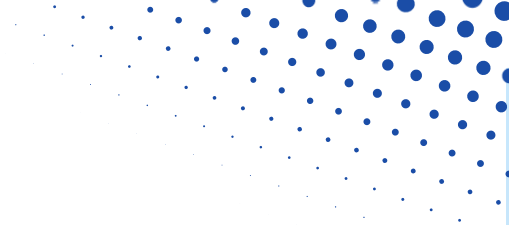
c. Rincian *Output* (RO)/Indikator RO

1) Layanan Pendidikan dan Pelatihan.

- Persentase SDM internal Kemendukbangga/BKKBN provinsi yang mendapatkan pelatihan.
- Persentase peserta pelatihan SDM internal Kemendukbangga/BKKBN provinsi yang lulus dengan kategori memuaskan dan sangat memuaskan.

II.5 Mitigasi Risiko

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Selain itu, tahun 2024 dalam memperkuat proses manajemen risiko telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor



39 Tahun 2024 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), bahwa penerapan MRPN mencakup seluruh pengelolaan risiko dalam Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Entitas MRPN pengelola keuangan negara.

Kemendukbangga/BKKBN telah menerapkan manajemen risiko melalui regulasi sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
2. Peraturan Inspektur Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Reviu Proses Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
3. Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 39/KEP.SES/B1/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN selaku pemilik risiko untuk level entitas Kemendukbangga/BKKBN bertanggung jawab untuk:

1. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
2. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
3. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
4. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun secara berjenjang.

Kemendukbangga/BKKBN telah mengidentifikasi/mitigasi indikasi risiko yang akan muncul dalam pencapaian sasaran strategis yang disusun sesuai Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Indikasi Risiko terhadap Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikasi Resiko
1	Meningkatnya keberhasilan pembangunan keluarga	a. Rendahnya partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga b. Tidak terselenggaranya pendamping keluarga secara optimal c. Kurangnya sinergi dengan kementerian/lembaga lain terkait pembangunan keluarga
2	Menurunnya angka fertilitas pada remaja usia 15-19 tahun	a. Kurangnya edukasi dan akses informasi kesehatan reproduksi remaja b. Norma budaya dan sosial yang tidak mendukung keterbukaan pembahasan kespro c. Meningkatnya penggunaan media sosial tanpa kontrol yang dapat mendorong perilaku berisiko
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan Kependudukan dan Pengendalian Penduduk	a. Pemutakhiran data kependudukan tidak dilakukan secara tertib dan kualitas pemutakhiran rendah b. Resistensi dari pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru
4	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	a. Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang tidak merata b. Penolakan masyarakat terhadap KB

No	Sasaran Strategis	Indikasi Resiko
		c. Keterbatasan tenaga medis, penyuluh KB di wilayah terpencil
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang merata dalam pelaksanaan program Bangga Kencana	a. Informasi Program Bangga Kencana tidak tersampaikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat b. Ketimpangan akses antarwilayah (perkotaan vs perdesaan) c. Keterbatasan jumlah SDM tenaga lini lapangan (penyuluh KB, PLKB dan kader) untuk menjangkau seluruh wilayah) d. Mitra kerja belum seluruhnya memahami mekanisme kolaborasi dalam program Bangga Kencana e. Belum terbentuknya kelompok kerja/unit khusus dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di tingkat kelurahan/desa
6	Terwujudnya Kemendukbangga/BKKBN yang Kolaboratif, Kapabel dan Berintegritas untuk Melayani Masyarakat	a. Munculnya praktik gratifikasi, fraud, dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program b. Keterbatasan kompetensi ASN dalam manajemen modern dan <i>digitalisasi</i> layanan c. Kurangnya budaya kerja kolaboratif lintas unit

No	Sasaran Strategis	Indikasi Resiko
		dan mitra kerja

Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah mengidentifikasi/mitigasi indikasi risiko yang akan muncul dalam pencapaian sasaran strategis pada Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta yang disusun sesuai Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikasi Risiko terhadap Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko
1	Meningkatnya keberhasilan pembangunan keluarga	Terwujudnya Keberhasilan Pembangunan Keluarga yang Merata di Provinsi	a. Tingkat fertilitas (TFR) yang sangat rendah di bawah replacement level b. Menurunnya angka kelahiran di DIY dalam beberapa tahun terakhir c. ketidakseimbangan demografis dan tekanan sosial ekonomi jika jumlah generasi muda terus menurun d. Tingginya angka penduduk usia lanjut (lansia)
2	Menurunnya angka fertilitas pada remaja	Terwujudnya Keberhasilan	a. Perlunya metode khusus untuk menjangkau remaja dalam upaya edukasi dan

No	Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko
	usia 15-19 tahun	Pembangunan Keluarga yang Merata di Provinsi	promosi program terkait ketahanan remaja.
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan Kependudukan dan Pengendalian Penduduk	Meningkatnya Integrasi Kebijakan Kependudukan dalam Pembangunan Daerah	a. Kualitas dan Konsistensi Data yang Belum Sepenuhnya Merata b. Belum Optimalnya Pemanfaatan Data untuk Penajaman Indikator Sasaran Strategis
4	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Meningkatnya Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang merata di Provinsi	a. Masih tingginya <i>Unmet Need</i> b. Tantangan <i>Digitalisasi</i> dalam Pelaksanaan dan Pelaporan Program c. Kendala Akses dan Keandalan Sistem Pelaporan Berbasis <i>Website</i>.
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang merata dalam pelaksanaan program Bangga Kencana	Meningkatnya Implementasi Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana di Provinsi	a. <i>Fatherless</i> sebagai Tantangan Penguatan Peran Ayah dalam Pengasuhan b. Belum optimalnya partisipasi lansia dalam SIDAYA (<i>Active ageing</i>) di DIY c. Keterbatasan Cakupan dan Jangkauan Program BKB

No	Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko
		Terwujudnya Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi yang berkualitas di setiap tingkatan wilayah	a. Keterbatasan Infrastruktur dan Dukungan Teknologi Informasi di Beberapa Wilayah b. Keterbatasan kapasitas analitik lanjutan dan pemanfaatan teknologi <i>digital</i> mutakhir c. Banyaknya portal pelaporan dan aplikasi dalam pelaksanaan program kerja di lapangan menimbulkan kompleksitas dalam proses pencatatan dan pelaporan kegiatan
		Terwujudnya SDM Eksternal; Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana yang Berkualitas Tingkat Provinsi	a. Tingginya Tingkat Pergantian (Turnover) SDM Eksternal. b. Beban Kerja yang Tinggi dan Peran Ganda SDM eksternal
		Terwujudnya Implementasi Kebijakan Strategi yang termanfaatkan di Tingkat Provinsi	a. kelompok kerja bangga kencana belum optimal

No	Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko
6	Terwujudnya Kemendukbangga/BKKBN yang Kolaboratif, Kapabel dan Berintegritas untuk Melayani Masyarakat	Terwujudnya Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang berkualitas di Tingkat Provinsi	a. Belum semua pegawai memahami SPIP
		Terwujudnya pengelolaan program yang akuntabel dan berintegrasi di Tingkat Provinsi	a. Pencatatan BMN yang belum tertib
		Terwujudnya SDM internal Kemendukbangga/BKKBN provinsi yang Berkualitas	a. Kesenjangan Kompetensi dan Standar Kualitas SDM b. Keterbatasan Akses dan Intensitas Pengembangan Kompetensi SDM



BAB III

**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi

- Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam kerangka kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 terdapat 4 Prioritas Nasional yang terkait erat dengan tugas dan fungsi Kementerian Kemendukbangga/BKKBN, yaitu: Prioritas Nasional 2 (dua), 4 (empat), dan 6 (enam).

Kemendukbangga/BKKBN mendukung Prioritas Nasional (PN) 2 yaitu “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi *Digital*, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru” khususnya pada Program Prioritas Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi pada Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional.

Pada Prioritas Nasional (PN) 4: “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, Kemendukbangga/BKKBN secara langsung berkontribusi terhadap 4 (empat) program prioritas sebagai berikut:

1. Program Prioritas Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, pada kegiatan prioritas:
 - a. Penurunan Kematian Ibu dan Anak;
 - b. Pencegahan dan Penurunan *Stunting*; dan
 - c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi bagi Usia

- 
- Sekolah, Usia Produktif, dan Lansia serta KB dan Kespro.
2. Program Prioritas Peningkatan Ketangguhan Keluarga, pada kegiatan prioritas:
 - a. Penguatan Institusi Keluarga untuk Penanaman Nilai-Nilai, Moral, Integritas Karakter, dan Pengembangan Psikososial Anak;
 - b. Penyediaan Fasilitas Pendukung Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Utama Keluarga; dan
 - c. Pemenuhan Hak Sipil dan Hukum, serta Afirmasi bagi Keluarga Rentan.
 3. Program Prioritas Peningkatan Kualitas Pemuda, pada Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, Pramuka, dan Pencegahan Perilaku Berisiko.
 4. Program Prioritas Peningkatan Kesenjangan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, pada Kegiatan Prioritas Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

Pada Prioritas Nasional (PN) 6 dalam “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan”, Kemendukbangga/BKKBN berkontribusi pada 2 (dua) program prioritas yaitu:

1. Pada Program Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif pada Kegiatan Prioritas Pengembangan Ekonomi Perawatan (Care Economy); dan
2. Program Prioritas Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan pada Kegiatan Pendampingan/Penyuluhan.

Kemendukbangga/BKKBN juga Prioritas memperhatikan Tata Kelola lingkup/area penyelenggaraan Program Bangga Kencana mulai dari kelompok masyarakat paling kecil yaitu keluarga sampai



pada seluruh tingkatan wilayah baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Program Bangga Kencana berkontribusi pada terwujudnya keamanan dan kemandirian bangsa melalui penguatan pembangunan keluarga untuk memunculkan keluarga yang berketahanan. Dengan memastikan keluarga yang kuat dan berketahanan, maka SDM yang dihasilkan dapat berkualitas dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan di berbagai sektor.

Arah kebijakan dan strategi RPJMN 2025-2029 menjadi panduan untuk dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi program di Kemendukbangga/BKKBN.

- Arah Kebijakan dan Strategi Kemendukbangga/BKKBN

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJMN) di atas, maka Kemendukbangga/BKKBN mengembangkan kerangka arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang Berkualitas”. Dalam pengembangan dan rencana pelaksanaan arah kebijakan dan strategi dimaksud, Kemendukbangga/BKKBN akan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, bermitra dengan seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dengan pola kemitraan pentahelix, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Kerangka arah kebijakan dan strategi dalam bidang pembangunan keluarga diarahkan melalui penerapan 8 (delapan) fungsi keluarga melalui pendekatan siklus hidup mulai dari ibu hamil, balita, remaja, dewasa/produktif dan lanjut usia dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial. Dalam mendukung upaya terwujudnya pengasuhan yang berkualitas, integrasi perspektif gender dilakukan untuk memastikan peran yang setara antar orang tua dalam melakukan pengasuhan dan tidak

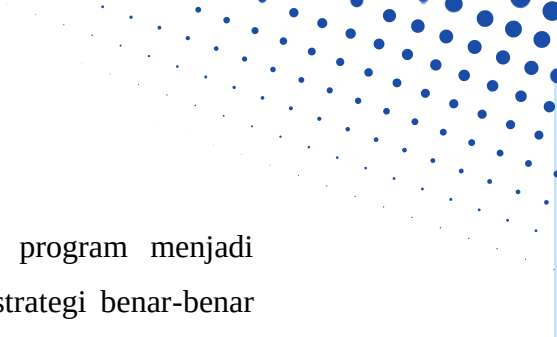


terjadinya diskriminasi antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Pada kerangka kebijakan dan strategi di bidang kependudukan, Kemendukbangga/BKKBN akan berfokus pada koordinasi dan sinkronisasi lintas Kementerian/Lembaga dan pembinaan (bimbingan teknis) kepada pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan berwawasan kependudukan.

Kerangka kebijakan dan strategi dalam lingkup bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi akan fokus pada upaya peningkatan akses dan kualitas layanan KB dan Kespro, dengan upaya menurunkan disparitas pelayanan yang masih terjadi, memberikan perhatian pada daerah tertinggal, perbatasan, kelompok marginal, serta pelibatan laki-laki dalam program KB, sehingga layanan KB dapat dilakukan secara universal dan inklusif.

Untuk menjamin pengembangan dan pelaksanaan arah kebijakan dan strategi di atas dibutuhkan penguatan manajerial. Dengan mempertimbangkan kondisi umum, potensi dan peluang, serta permasalahan dan tantangan pada Bab I, Kemendukbangga/BKKBN akan melakukan transformasi manajemen pengelolaan program, meliputi: (1) Pengembangan kebijakan berbasis data dan bukti, dalam hal ini penyusunan kebijakan dapat ditingkatkan kualitasnya dengan basis data sektoral yang berkualitas (sebagai contoh; data Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program/SKAP dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI); (2) Orkestrasi kebijakan lintas Kementerian/Lembaga dan daerah, sebagai contoh melalui penerapan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK); (3) Promosi inovasi sosial dan layanan *digital*, sebagai contoh melalui pengembangan pelayanan masyarakat dengan Super Apps berbasis AI; serta (4) Kemitraan transformational (pentahelix). Transformasi manajemen tersebut tetap dalam kerangka mandat yang diberikan oleh pemerintah dan peraturan perundangan yang berlaku.



Transformasi manajemen pengelolaan program menjadi kunci untuk memastikan arah kebijakan dan strategi benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik. Melalui penguatan kebijakan berbasis data dan bukti, kebijakan yang dirumuskan lebih tajam, terukur, dan dapat mendarat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Integrasi lintas K/L dan pemerintah daerah dapat mendorong terwujudnya sinergi implementasi strategi di seluruh tingkatan wilayah. Inovasi sosial dan pemanfaatan layanan *digital* hadir sebagai penggerak agar pelayanan lebih cepat, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dukungan kemitraan pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, diharapkan dapat mendorong legitimasi implementasi strategi, tidak hanya datang dari atas ke bawah, tetapi juga berakar dari kebutuhan nyata masyarakat. Dengan cara ini, transformasi manajemen pengelolaan program menjadi penghubung yang memastikan arah kebijakan dan strategi dapat diterjemahkan ke dalam langkah nyata yang berorientasi pada hasil dan keberlanjutan. Secara detail, arah kebijakan dan strategi meliputi:

1. Bidang Pengendalian Penduduk

Meningkatkan sinergi kebijakan pengendalian penduduk secara holistik dan komprehensif dalam kerangka demografi (fertilitas, mortalitas, mobilitas, struktur penduduk, distribusi, dan kepadatan penduduk) dalam rangka mendukung upaya kapitalisasi bonus Demografi, melalui strategi:

- a. Penguatan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di seluruh tingkatan wilayah;
- b. Penguatan sinergitas perencanaan dan konvergensi pelaksanaan pengendalian penduduk di pemerintah pusat dan daerah;
- c. Penyediaan dan pemanfaatan parameter pengendalian kependudukan;
- d. Peningkatan kerja sama pendidikan kependudukan dengan

instansi/lembaga pendidikan; dan

- e. Penguatan implementasi penanganan terpadu dampak kependudukan.

2. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan siklus hidup dalam mendukung penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, melalui strategi:

- a. Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak usia dini (0-6 tahun), terutama fase 1000 HPK;
- b. Pendampingan pengasuhan di tempat penitipan anak melalui standarisasi kompetensi fasilitator pengasuhan anak usia dini, pemantauan tumbuh kembang anak usia dini secara berkala, pelibatan orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan memperkuat layanan rujukan;
- c. Peningkatan kualitas remaja termasuk pra-remaja dalam pengetahuan kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga;
- d. Peningkatan pengetahuan remaja dan calon pengantin dalam pencegahan dan penurunan *stunting*;
- e. Peningkatan kualitas ayah dalam pengetahuan pengasuhan anak dan pendampingan remaja;
- f. Peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga dan keterlibatan lansia dalam perawatan kesehatan, aktivitas sosial, kesempatan berwirausaha serta pemberian fasilitas kemudahan bagi lansia dengan keterlibatan multisektor;
- g. Pendampingan dan pembinaan sasaran keluarga rentan melalui pelayanan konsultasi dan konseling keluarga pada Satyagatra;
- h. Pendampingan dan pembinaan kemandirian ekonomi keluarga; dan
- i. Penguatan program pembangunan keluarga berbasis

komunitas dan pemanfaatan teknologi informasi.

3. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif dan inklusif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran sesuai dengan siklus hidup melalui strategi:

- a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Fasilitasi peningkatan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR);
- c. Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) berdasarkan siklus hidup;
- d. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di wilayah dan sasaran khusus;
- e. Penguatan komunikasi, informasi dan edukasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai segmentasi sasaran;
- f. Mendorong pengembangan inovasi pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR); dan
- g. Peningkatan jejaring kemitraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR).

4. Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat

Meningkatkan kualitas penggerakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), peran serta masyarakat dan dukungan mitra kerja (pentahelix) dalam penyelenggaraan program di seluruh tingkatan wilayah, melalui strategi:

- a. Peningkatan kualitas penggerakan program oleh tenaga lini lapangan Penyuluh KB dan PLKB;

- b. Peningkatan kualitas peran serta Institusi Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan (IMP Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)/Sub IMP Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana));
- c. Pendampingan, pembinaan, komunikasi, informasi dan edukasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
- d. Pendampingan dan pembinaan keluarga dalam pencegahan dan penurunan *stunting* terutama terkait dengan penyiapan 1000 hari pertama kehidupan; dan
- e. Peningkatan kualitas dan peran serta aktif mitra kerja (pentahelix) dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

5. Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

Mewujudkan tata kelola kebijakan publik bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berkualitas dalam memanfaatkan jendela peluang bonus demografi, melalui strategi:

- a. Peningkatan kualitas ekosistem perumusan kebijakan dan strategi makro pengendalian kuantitas penduduk;
- b. Peningkatan kualitas ekosistem perumusan kebijakan dan strategi makro kerangka pembangunan keluarga dan keluarga berencana;
- c. Peningkatan kualitas ekosistem perumusan kebijakan dan strategi makro akses dan kualitas pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga; dan
- d. Peningkatan kualitas ekosistem perumusan kebijakan dan strategi makro sumber daya dan kemandirian keluarga

berencana.

6. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama

Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN, melalui strategi:

- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam implementasi Bangga Kencana; dan
- b. Peningkatan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan Bangga Kencana (dirumuskan mengacu Permenpan 3 Tahun 2023).

7. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Meningkatkan kualitas SDM Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana melalui strategi:

- a. Peningkatan kompetensi SDM Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana baik internal maupun eksternal termasuk Penyuluh KB dan PLKB; dan
- b. Penilaian Potensi dan Kompetensi melalui Sertifikasi/Uji Kompetensi.

8. Pusat Data dan Teknologi Informasi

Meningkatkan kualitas Data dan Teknologi Informasi, serta inovasi dan kualitas dukungan TIK dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana, melalui strategi:

- a. Penyediaan Data Mikro Keluarga;
- b. Peningkatan akses pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis TI (smart technology/smart program); dan
- c. Peningkatan inovasi dan kualitas dukungan TIK dalam penyelenggaraan Bangga Kencana.

A. Perencanaan Program dan Kegiatan Prioritas Berbasis Kewilayahan

Arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan pada bagian 3.2 memprioritaskan indikator sasaran strategis yang harus dicapai secara Provinsi. Namun capaian tingkat Provinsi juga tidak terlepas dari pencapaian target/sasaran di seluruh tingkatan wilayah.

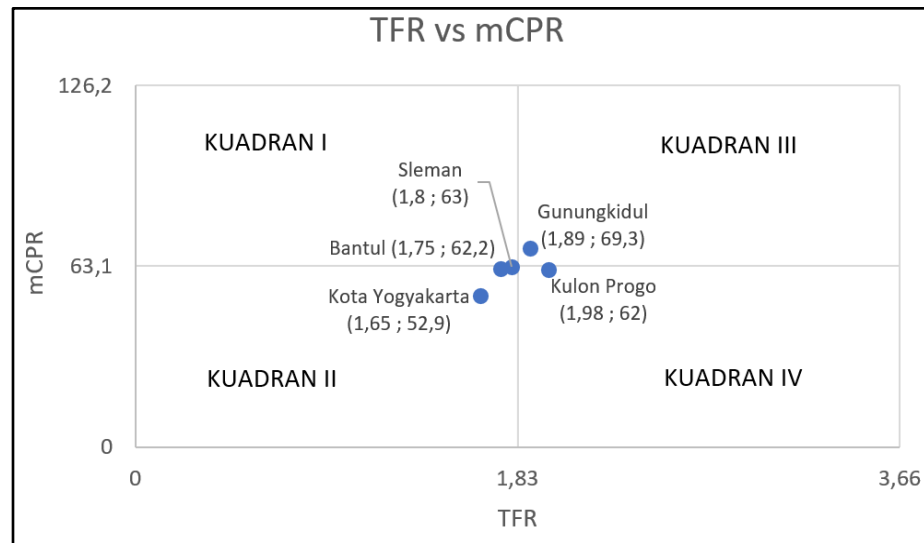
Untuk menjamin penggarapan program dan kegiatan prioritas yang disusun secara Provinsi dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan wilayah diperlukan pemetaan target sasaran strategis setiap Kabupaten/Kota serta pemetaan potensi yang dapat menjadi fokus penggarapan di setiap wilayah.

Target sasaran dan prioritas penggarapan program tersebut dituangkan di dalam matriks renstra provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam konteks isu pemerataan hasil pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana di seluruh wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta juga akan memberi perhatian lebih pada Kabupaten/Kota yang capaiannya di bawah angka rata-rata Provinsi. Hal ini dilakukan agar disparitas pencapaian program dapat lebih diperkecil.

Untuk program KBKR, fokus garapan kewilayahan juga diperkuat dengan analisis kuadran yaitu menganalisis keterkaitan indikator determinan tingkat kelahiran yang telah diakui secara internasional yaitu pemakaian kontrasepsi, kebutuhan KB yang terpenuhi (*Demand Satisfied*), dan *Unmet Need*. Analisis kuadran dilakukan agar pengembangan kegiatan menjadi lebih tepat sasaran dan tepat guna.

1. Keterkaitan antara Total Fertility Rate (TFR) dan *Modern Contraceptive Prevalence Rate*(mCPR)

Gambar 3. 1 Total Fertility Rate VS Tingkat Penggunaan Kontrasepsi Modern



Sumber data: Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia/PK 2024

Gambar 3.1 memperlihatkan pola hubungan TFR dengan mCPR di setiap Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia/PK Tahun 2024, TFR Provinsi DIY Tahun 2024 adalah 1,83, sedangkan mCPR Provinsi DIY Tahun 2024 adalah 63,1. Kuadran I adalah Kabupaten/Kota dengan TFR di bawah rata-rata Provinsi dan mCPR di atas rata-rata Provinsi. Kuadran II adalah Kabupaten/Kota dengan TFR di bawah rata-rata Provinsi dan mCPR di bawah rata-rata Provinsi. Kuadran III adalah Kabupaten/Kota dengan TFR di atas rata-rata Provinsi dan mCPR juga di atas rata-rata Provinsi. Kuadran IV adalah Kabupaten/Kota dengan TFR di atas rata-rata Provinsi dan mCPR di bawah rata-rata Provinsi.

Analisis kuadran TFR dan mCPR sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1 menunjukkan bahwa:

- Kelompok kuadran I adalah kelompok yang pencapaian program KBKR-nya ideal. Dimana TFR telah berada di bawah rata-rata Provinsi dan mCPR-nya telah di atas rata-rata Provinsi. Ini adalah kondisi ideal yang diinginkan.
- Kelompok kuadran II adalah kelompok yang pencapaian program KBKR-nya sangat ideal. Dimana TFR telah berada di bawah rata-rata Provinsi dan mCPR-nya di bawah rata-rata

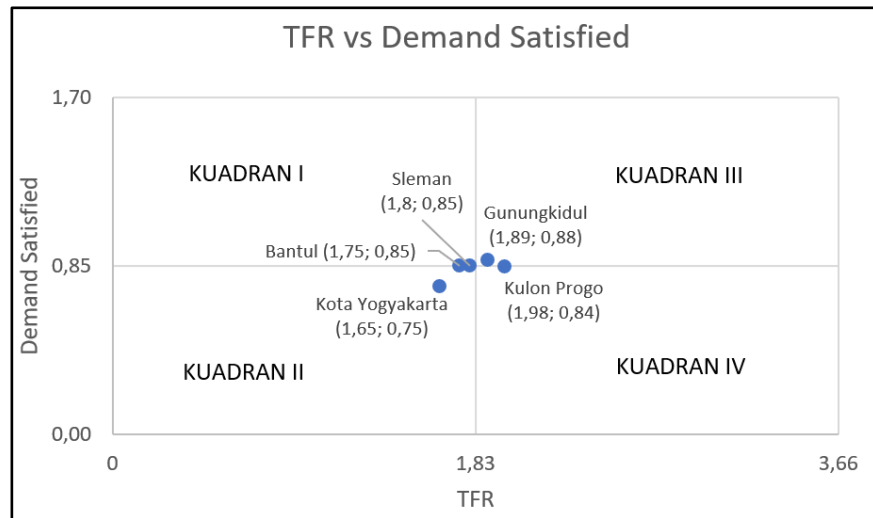


Provinsi. TFR pada kuadran II bisa di bawah rata rata Provinsi walaupun mCPR-nya juga di bawah rata-rata Provinsi disebabkan tingginya pemakaian metode jangka panjang dan juga tingginya usia kawin pertama perempuan. Dengan pemakaian MKJP yang tinggi dan usia median kawin pertama perempuan yang tinggi menjadikan program KBKR lebih efisien secara ekonomi.

- c. Kelompok kuadran III adalah kelompok yang pencapaian program KBKR sangat tidak efisien. Pada kelompok ini walaupun mCPR sudah di atas rata-rata Provinsi namun TFR juga masih di atas rata-rata Provinsi. Kondisi ini dapat terjadi karena tingkat putus pakai yang sangat tinggi di kelompok ini. Tingginya mCPR tidak berdampak banyak pada penurunan TFR karena faktor putus pakai tersebut. Investasi dalam penyediaan kontrasepsi menjadi kurang bermakna. Fokus penggarapan program pada kuadran ini adalah menurunkan tingkat putus pakai.
- d. Kelompok kuadran IV adalah kelompok yang pencapaian program KBKR nya masih sangat rendah. Pada kelompok ini mCPR masih rendah dan TFR di atas rata-rata Provinsi. Kondisi ini dapat terjadi karena pemahaman Masyarakat tentang KB masih rendah, maupun tingginya *Unmet Need*. Fokus penggarapan program pada kelompok ini adalah demand creation dan perluasan jangkauan pelayanan.

2. Keterkaitan antara Total Fertility Rate (TFR) dan Kebutuhan Ber-KB yang Terpenuhi (*Demand Satisfied*)

Gambar 3. 2 Total Fertility Rate (TFR) vs Demand Satisfied



Sumber data: Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia/PK 2024 yang diolah

Kebutuhan ber-KB yang terpenuhi (*Demand Satisfied*) adalah salah satu indikator keberhasilan program KB yang dipakai secara global saat ini. *Demand Satisfied* merupakan hasil perhitungan dari mCPR dan *Unmet Need*. Karena itu penting juga melakukan analisis kuadran antara kebutuhan ber-KB yang terpenuhi dengan tingkat TFR untuk melihat pola hubungan keduanya dan menetapkan fokus kegiatan yang diperlukan. Gambar 3.2 memperlihatkan analisis kuadran antara kebutuhan ber-KB yang terpenuhi dengan tingkat kelahiran. Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia/PK 2024 yang diolah, Kebutuhan ber-KB yang terpenuhi (*Demand Satisfied*) Provinsi DIY Tahun 2024 adalah 0,85.

- Kelompok kuadran I adalah kelompok dimana kebutuhan ber-KB terpenuhinya di atas rata-rata Provinsi (mCPR di atas rata-rata Provinsi dan *Unmet Need* di bawah rata-rata Provinsi) dan TFR-nya di bawah rata-rata Provinsi. Provinsi pada kelompok ini adalah ideal jika dilihat dari analisis kuadran *Demand Satisfied* dan TFR.
- Kelompok kuadran II adalah kelompok dimana kebutuhan ber-KB terpenuhinya di bawah rata-rata Provinsi (mCPR di

bawah rata-rata Provinsi dan *Unmet Need* di atas rata-rata Provinsi) dan TFR di bawah rata-rata Provinsi. Jika fokus program hanya terkait TFR dan mCPR tanpa memperhatikan *Unmet Need* maka provinsi yang masuk dalam kelompok ini sudah berhasil bahkan dikatakan sebagai sangat ideal dengan tingkat efisiensi program yang tinggi. Namun jika dikaitkan dengan hak reproduksi yang ditunjukkan dengan *Unmet Need* maka kondisi tersebut tentulah belum ideal. Karena itu jika menggunakan analisis kuadran kebutuhan ber-KB yang terpenuhi dengan TFR maka kondisi ideal adalah pada kuadran I. Sedangkan jika menggunakan analisis kuadran mCPR dengan TFR maka kondisi sangat ideal adalah pada kelompok kuadran II.

- c. Kelompok kuadran III adalah kelompok dimana kebutuhan ber-KB terpenuhinya di atas rata-rata Provinsi (mCPR di atas rata-rata Provinsi dan *Unmet Need* di bawah rata-rata Provinsi) tapi TFR masih di atas rata-rata Provinsi. Isu utama pada kelompok ini adalah tingginya drop out atau putus pakai.
- d. Kelompok kuadran IV adalah kelompok dimana kebutuhan ber-KB terpenuhinya di bawah rata-rata Provinsi (mCPR di bawah rata-rata Provinsi dan *Unmet Need* di atas rata-rata Provinsi) tetapi TFR di atas rata-rata Provinsi. Isu utama pada kelompok ini adalah perluasan jangkauan program dalam rangka menurunkan *Unmet Need* dan meningkatkan mCPR, serta meningkatkan penerimaan Masyarakat terhadap program KBKR.

III.2 Kerangka Regulasi

Penguatan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) perlu didukung oleh kerangka regulasi yang kuat baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri. Kerangka regulasi yang

direncanakan untuk dibuat dalam periode 5 tahun mendatang.

Untuk pembangunan keluarga dan kependudukan maka kerangka regulasi difokuskan agar seluruh pemangku kepentingan pembangunan utamanya pemerintah di setiap tingkatan wilayah mengimplementasikan pembangunan berwawasan kependudukan dan keluarga. Selain itu kerangka kebijakan juga diarahkan pada penguatan manajemen pelaksanaan program di tingkat kabupaten kota sampai ke lini lapangan.

Kerangka regulasi untuk pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) difokuskan pada upaya meningkatkan akses dan memperkuat kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) sehingga tercapai *universal access* dan pelayanan dapat memenuhi hak reproduksi setiap orang dan bersifat inklusif. Detail kerangka regulasi dapat dilihat pada Lampiran 3.

III.3 Kerangka Kelembagaan

Perubahan dinamika kependudukan nasional termasuk meningkatnya proporsi lansia, ketimpangan wilayah, migrasi, dan tantangan fertilitas menuntut adanya kelembagaan yang kuat, adaptif, serta mampu mengorkestrasi pembangunan keluarga secara terpadu. Transformasi kelembagaan melalui Peraturan Presiden Nomor 180 dan 181 Tahun 2024 menegaskan bahwa urusan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana harus dilaksanakan dalam satu sistem kebijakan yang saling terhubung dari pusat hingga daerah.

Renstra Kemendukbangga/BKKBN 2025–2026 menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan daerah, termasuk Perwakilan BKKBN Provinsi, yang menjadi simpul strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program operasional yang sesuai dengan kondisi lokal.

Setelah bertransformasi menjadi kementerian, proses bisnis

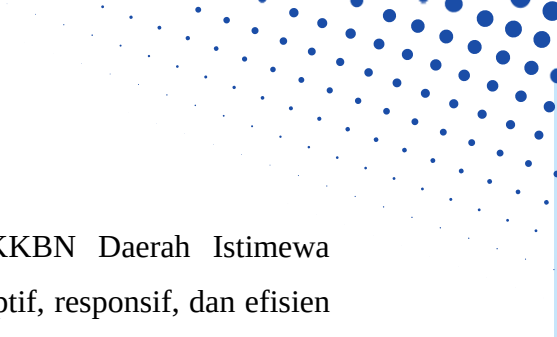
BKKBN mengalami perubahan yang mencerminkan peran baru yang lebih luas.

1. Proses inti Kemendukbangga terdiri atas: (a) Pengelolaan Pengendalian Penduduk; (b) Pengelolaan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR); (c) Pengelolaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; (d) Pengelolaan Penggerakan dan Peran serta Masyarakat; serta (e) Pengelolaan Pendataan Bangsa Kencana. Penambahan elemen strategi data ini menunjukkan arah baru yang mengedepankan kebijakan dan program berbasis bukti serta integrasi lintas sektor.
2. Proses Pendukung Kemendukbangga/BKKBN terdiri atas: (a) urusan administrasi umum; (b) pengawasan; (c) Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi, (d) Pengelolaan Kerjasama; dan (e) Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Proses ini merupakan elemen penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan terlaksananya proses inti.

Transformasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan program-sentris menuju pendekatan yang lebih strategis, berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dengan struktur baru ini, Kemendukbangga/BKKBN diharapkan mampu memainkan peran yang lebih kuat dalam perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung target Indonesia Emas 2045.

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis BKKBN di daerah yang memiliki mandat untuk melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di wilayah provinsi. Kelembagaan ini dibentuk untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan nasional melalui adaptasi dan operasionalisasi program sesuai karakteristik kewilayahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Dasar Hukum Kelembagaan



Kerangka kelembagaan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun dengan prinsip adaptif, responsif, dan efisien dan disusun berdasarkan ketentuan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- b. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang BKKBN.
- c. Peraturan BKKBN Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi.
- d. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 292 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi.
- e. Renstra Kemendukbangga/BKKBN 2025–2026, Bab III Kerangka Kelembagaan.

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Perwakilan, yang memiliki tanggung jawab strategis dalam perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi program. Kepala Perwakilan dibantu oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu dalam pelaksanaan tugas. Kepala Perwakilan didukung oleh tim kerja yang secara teknis dan administratif dikoordinasikan oleh ketua tim, setiap tim memiliki anggota terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana.

2. Fungsi Kelembagaan Perwakilan BKKBN Provinsi

Fungsi Perwakilan meliputi:

- a. Koordinasi kebijakan nasional dengan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Pembinaan teknis dan peningkatan kapasitas bagi tenaga lini lapangan, penyuluh KB, dan TPK.
- c. Pengelolaan data keluarga melalui SIGA, pendataan keluarga, dan sistem pelaporan lainnya.
- d. Pengendalian mutu program dan pelayanan KB/KR.
- e. Advokasi dan kemitraan pentahelix dalam percepatan penurunan *stunting* dan pembangunan keluarga.
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Bangga Kencana

dan DAK Subbidang KB.

3. Mekanisme Tata Kelola dan Sistem Kerja

a. Tata Kelola Berbasis Data

Renstra Kemendukbangga menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program harus berbasis data dan bukti (*evidence-based*). Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mengimplementasikan hal ini melalui:

- 1) SIGA sebagai basis data keluarga utama.
- 2) MORENA untuk monitoring dan evaluasi DAK KB.
- 3) Verifikasi dan validasi data keluarga *by name by address*.

b. Penyederhanaan Birokrasi

Sesuai Keputusan Kepala BKKBN Nomor 292 Tahun 2023, sistem kerja Perwakilan diarahkan pada:

- 1) Penguatan peran jabatan fungsional sebagai pelaksana utama tugas teknis.
- 2) Pembentukan tim kerja lintas unit untuk percepatan target kinerja.
- 3) Peningkatan kolaborasi antar tim kerja dan integrasi tugas.
- 4) Kinerja berbasis *output* dan *outcome*, bukan sekadar prosedur.

c. Koordinasi Pusat–Daerah Kerangka kelembagaan menegaskan:

- 1) Perwakilan sebagai penghubung strategis antara Kemendukbangga dengan provinsi/kabupaten/kota.
- 2) Sinkronisasi indikator kinerja.
- 3) Penguatan hubungan fungsional dengan perangkat daerah KB.
- 4) Pendampingan menyeluruh dalam implementasi program prioritas seperti: penurunan TFR, percepatan penurunan *stunting*, peningkatan layanan KB, pembangunan keluarga, serta penguatan TPK dan PLKB.

d. Dukungan Pendanaan

Pendanaan program dibangun melalui:

- 
- a. DAK Fisik dan Non-Fisik (BOKB) sebagai dukungan pusat untuk operasional program KB dan *stunting*.
 - b. *Sharing budget* antara pusat dan daerah untuk memperkuat keberlanjutan layanan.

Kerangka kelembagaan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mencerminkan perubahan paradigma kelembagaan menuju organisasi yang adaptif, berbasis data, kolaboratif, serta berorientasi hasil. Melalui struktur yang diatur dalam Peraturan BKKBN Nomor 6 Tahun 2024, didukung sistem kerja yang disederhanakan serta arah pembangunan keluarga yang ditetapkan dalam Renstra 2025–2026, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta siap memainkan peran strategis dalam mewujudkan keluarga berkualitas, pengendalian penduduk yang seimbang, dan percepatan penurunan *stunting* menuju Indonesia Emas 2045.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Tahun 2025-2029, visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan berbagai strategi operasional Kemendukbangga / BKKBN Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka berikut ini dirumuskan target kinerja dan kerangka pendanaan untuk Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Kemendukbangga/BKKBN memiliki 1 (satu) program teknis yaitu Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan 1 (satu) program pendukung yaitu Program Dukungan Manajemen. Berikut adalah ruang lingkup kedua program tersebut.

A. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), terdiri dari:

1. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK);
2. Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK);
3. Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR);
4. Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat (PERMAS);
5. Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (JAKSTRA);

B. Program Dukungan Manajemen Kemendukbangga/BKKBN, terdiri atas:

1. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (SETMEN/SETTAMA); dan
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama (ITTAMA).
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PUSBANG SDM); dan

4. Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, bahwa unit organisasi Perwakilan BKKBN Provinsi mengalami penyederhanaan birokrasi yang hanya terdiri Pejabat Tinggi Pratama, Sekretaris Perwakilan dan Tim Kerja.

IV.1 Target Kinerja

- Keterkaitan Target Kinerja Renstra 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Target kinerja pada Renstra 2025-2029 disusun berdasarkan target indikator RPJMN 2025-2029. Dalam hal ini, seluruh indikator yang dimandatkan kepada Kemendukbangga/BKKBN pada level Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP), telah diakomodir pada Renstra 2025-2029 dengan menyesuaikan pada struktur organisasi serta tugas dan fungsi Kemendukbangga/BKKBN. Berikut adalah uraian detail kesesuaian Renstra 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029 yang dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Kesesuaian Indikator RPJMN 2025-2029 dan Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Posisi Indikator dalam RPJMN	Posisi Indikator dalam Rancangan Renstra	Target RENSTRA					Kesesuaian Target RENSTRA dan RPJMN
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	Angka Fertility Rate (TFR)	Rata-Rata Kelahiran per WUS 15-49 Tahun	Indikator PN 4	Indikator Tujuan 2	2,12	2,11	2,1	2,1	2,1	Sesuai

No	Indikator	Satuan	Posisi Indikator dalam RPJMN	Posisi Indikator dalam Rancangan Renstra	Target RENSTRA					Kesesuaian Target RENSTRA dan RPJMN
					2025	2026	2027	2028	2029	
2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)</i>	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	Indikator dalam KP: Penurunan kematian ibu dan anak	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	19,4	19	18,6	18,2	17,8	Sesuai
3	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (<i>Proportion of Demand Satisfied by Modern Methods</i>)	Persen	Indikator dalam PP: Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	84,7	85,3	85,9	86,5	87,1	Sesuai
4	Persentase KB Pasca Persalinan	Persen	Indikator dalam KP: Penurunan kematian ibu dan anak	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	57	60	64	69	75	Sesuai
5	Persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 HPK	Persen	Indikator dalam KP: Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>	Indikator Kinerja Kegiatan	75	80	85	90	95	Sesuai

No	Indikator	Satuan	Posisi Indikator dalam RPJMN	Posisi Indikator dalam Rancangan Renstra	Target RENSTRA					Kesesuaian Target RENSTRA dan RPJMN
					2025	2026	2027	2028	2029	
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need KB</i>)	Persen	Indikator dalam KP: Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro	Indikator Kinerja Sasaran Program	10,5	10	9,5	9	8,5	Sesuai
7	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i> (mCPR)	Persen		Indikator Kinerja Sasaran Program	61,8	61,9	62	62,1	62,2	Sesuai
8	Persentase peserta KB aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen		Indikator Kinerja Kegiatan	25,7	26	26,2	26,4	26,7	Sesuai
9	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks (Skala 1-100)	Indikator PN 4	Indikator Tujuan	72,89	73,83	74,5	75,09	75,5	Sesuai

No	Indikator	Satuan	Posisi Indikator dalam RPJMN	Posisi Indikator dalam Rancangan Renstra	Target RENSTRA					Kesesuaian Target RENSTRA dan RPJMN
					2025	2026	2027	2028	2029	
10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (Skala 1-100)	Indikator dalam PP 14 - Peningkatan Ketangguhan Keluarga	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	64,1	65,8	67,5	69,2	70,9	Sesuai
11	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	Tahun		Indikator Kinerja Sasaran Program	22,4	22,5	22,6	22,7	22,8	Sesuai
12	Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini	Indeks (Skala 1-100)	Indikator dalam KP 01 - Penguatan Institusi Keluarga untuk Penanaman Nilai-Nilai, Moral, Integritas Karakter, dan Pengembangan Psikososial Anak	Indikator Kinerja Kegiatan	55,66	56,16	56,61	57,04	57,43	Sesuai
13	Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja	Persen		Indikator Kinerja Kegiatan	45	51	57	63	70	Sesuai

No	Indikator	Satuan	Posisi Indikator dalam RPJMN	Posisi Indikator dalam Rancangan Renstra	Target RENSTRA					Kesesuaian Target RENSTRA dan RPJMN
					2025	2026	2027	2028	2029	
14	Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah	Persen		Indikator Kinerja Kegiatan	45	51	57	63	70	Sesuai
15	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	Persen		Indikator Kinerja Kegiatan	85,2	85,7	86,2	86,7	87,2	Sesuai
16	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau	Persen	Indikator dalam KP 02 - Penyediaan Fasilitas Pendukung Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Utama Keluarga	Indikator Kinerja Kegiatan	70	75	80	85	90	Sesuai
17	Persentase Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan	Persen		Indikator Kinerja Kegiatan	10	20	30	40	50	Sesuai

No	Indikator	Satuan	Posisi Indikator dalam RPJMN	Posisi Indikator dalam Rancangan Renstra	Target RENSTRA					Kesesuaian Target RENSTRA dan RPJMN
					2025	2026	2027	2028	2029	
18	Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga	Indeks (Skala 1-100)	Indikator dalam KP 03 - Pemenuhan Hak Sipil, Hukum, dan Ekonomi Keluarga dan Afirmasi bagi Keluarga Rentan	Indikator Kinerja Kegiatan	55,41	56,41	57,41	58,41	59,41	Sesuai
19	Indeks Kerentanan Keluarga	Persen		Indikator Kinerja Sasaran Program	8,6	8,4	8,2	8	7,8	Sesuai
20	Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan	Persen	Indikator dalam KP 01 - Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Indikator Kinerja Kegiatan	10	12	14	16	18	Sesuai

Renstra Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta juga memuat indikator yang tidak dimandatkan dalam RPJMN 2025-2029 namun merupakan penerjemahan tugas dan fungsi organisasi serta dinilai dapat memberikan dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional.

- **Target Indikator Kinerja Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025-2029**

Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan target kinerja pada masing-masing level indikator, mulai dari tujuan, sasaran strategis, program, hingga kegiatan. Indikator tujuan Kemendukbangga/BKKBN dapat tercapai melalui kontribusi dari capaian indikator di level sasaran strategis. Pencapaian sasaran strategis merupakan pencerminan dari berhasilnya capaian keluaran pada level *output*/kegiatan dan pada level program di Lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada level tujuan, Kemendukbangga/BKKBN memiliki tiga indikator yang dapat merefleksikan keberhasilan penyelenggaraan program Bangga Kencana dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4. 2 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode	Indikator Tujuan		Baseline	Target					Satuan
				2025	2026	2027	2028	2029	
T1	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang Berkualitas								
	1.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	64,5 (2024)	66,7	68,8	70,7	72,5	74,2	Indeks (Skala 1-100)
	2.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	81,45 (2024)	82,52	83,27	83,82	84,24	84,57	Indeks (Skala 1-100)
	3.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	1,83 (PK 2023)	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	Rata-rata anak per wanita

Dalam mencapai tujuan di atas, dibutuhkan kontribusi dari 6 (enam) Sasaran Strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 di bawah ini. Masing-masing sasaran strategis memiliki indikator dan target sebagai refleksi dari hasil kinerja Kemendukbangga/BKKBN

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 5 tahun ke depan.

Tabel 4. 3 Sasaran strategis, Indikator Sasaran Strategis, dan Target Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode	Indikator Sasaran Strategis	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
SS1	Meningkatnya keberhasilan pembangunan keluarga							
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,8	66,5	68,2	69,9	71,6	73,3	Indeks (Skala 1-100)
SS2	Menurunnya angka fertilitas pada remaja usia 15-19 tahun							
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR 15-19)	9	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	Kelahiran per WUS 15-19 tahun
SS3	Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan Kependudukan dan Pengendalian Penduduk							
	Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK)	59	60	61	62	62	63	Indeks (Skala 1-100)
SS4	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi							
	Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) / <i>Unwanted Pregnancy</i>	11,76	11,67	11,58	11,5	11,42	11,34	Persen
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (<i>Proportion of Demand Satisfied by Modern Method</i>)	83,58	84,28	84,88	85,50	86,12	86,74	Persen
SS5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang merata dalam pelaksanaan program Bangga Kencana							
	Indeks Partisipasi Masyarakat (IPaM) dalam Program Bangga Kencana	N/A	67,86	70,86	73,86	76,86	79,86	Indeks (Skala 1-100)
SS6	Terwujudnya Kemendukbangga/BKKBN yang Kolaboratif, Kapabel dan Berintegritas untuk Melayani Masyarakat							

Kode	Indikator Sasaran Strategis	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Reformasi Birokrasi	77,35	78	78,5	80	80,5	81	Indeks (Skala 1-100)

Sasaran Strategis Kemendukangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dicapai melalui kontribusi dari hasil pelaksanaan program baik secara teknis maupun pendukung. Program Teknis Bangga Kencana pada Renstra Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta 2025-2029 diimplementasikan pada Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebanyak 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan pada Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan pada Program Pelaksanaan Dukungan Manajemen. Pada Level Unit Kerja Eselon II akan disampaikan Sasaran Kegiatan yang dilengkapi dengan indikator pengukurnya. Berikut adalah uraian dari Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan pada masing-masing kegiatan tersebut:

Tabel 4. 4 Sasaran Kegiatan beserta Indikator dan Target Kegiatan Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode	Sasaran Kegiatan / Indikator Kegiatan		Baseline	Target					Satuan
				2025	2026	2027	2028	2029	
IKK.1	Terwujudnya Keberhasilan Pembangunan Keluarga yang Merata di Provinsi								
	1	Persentase kabupaten/kota dengan capaian ibangga di atas capaian ibangga provinsi	60	60	80	80	80	80	Persen
	2	Persentase kabupaten/kota dengan capaian angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun dibawah capaian provinsi	60,00%	60,25%	66,19%	72,12%	78,06%	80,00%	Persen
SK.2.	Meningkatnya Integrasi Kebijakan Kependudukan dalam Pembangunan Daerah								

Kode	Sasaran Kegiatan / Indikator Kegiatan		Baseline	Target					Satuan
				2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Persentase Kabupaten/Kota dengan nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di atas nilai Nasional	60	60,3	60,9	62,4	63,9	65,4	Persen
	2	Persentase Kabupaten/Kota dengan klasifikasi nilai Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) minimal kategori "Sedang"	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Persen
SK.3.	Meningkatnya penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang merata di Provinsi								
	1	Persentase kabupaten/kota dengan capaian Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern diatas capaian provinsi	60	60	60	60	60	60	Persen
	2	Jumlah Kabupaten/Kota dengan peserta KB Pascapersalinan mencapai target	3	1	2	3	4	5	Kabupaten/Kota
SK.4.	Meningkatnya implementasi penggerakan dan peran serta masyarakat dalam program kependudukan, Pembangunan keluarga dan keluarga berencana di Provinsi								
	1	Persentase Putus Pakai Alat dan Obat Kontrasepsi	N/A	20	29,5	19,1	18,6	18,2	Persen
	2	Persentase keluarga yang terpapar program bangga kencana	81	82	83	84	85	86	Persen
	3	Jumlah mitra kerja yang mendukung Program Bangga Kencana	14	19	24	29	34	39	Mitra Kerja
SK.5.	Terwujudnya Implementasi kebijakan strategi yang termanfaatkan di Tingkat Provinsi								
	1	Indeks Implementasi Kebijakan Strategi Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan	N/A	65	65,1	65,2	65,3	65,4	Indeks

Kode	Sasaran Kegiatan / Indikator Kegiatan		Baseline	Target					Satuan
				2025	2026	2027	2028	2029	
		Keluarga Berencana di provinsi							
SK.6.	Terwujudnya SDM Eksternal Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana yang Berkualitas Tingkat Provinsi								
	1	Persentase SDM Eksternal yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi untuk Pemenuhan Standar Kompetensi Tingkat Provinsi	N/A	83	84	86	88	90	Persen
SK.7.	Terwujudnya pengelolaan data dan teknologi informasi yang berkualitas di setiap tingkatan wilayah								
	1	Persentase pemerintah daerah yang memiliki Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi yang berkualitas	N/A	80	85	90	95	100	Persen
SK.1.	Terwujudnya penyelenggaraan Dukungan manajemen yang berkualitas di Tingkat Provinsi								
	1	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen di Tingkat Provinsi	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56	Indeks
SK.2.	Terwujudnya pengelolaan program yang akuntabel dan berintegrasi di Tingkat Provinsi								
	2	Indeks Zona Integritas (ZI)	89	86	86	86	86	86	Indeks (Skala 1-100)
SK.3.	Terwujudnya SDM internal Kemendukbangga/BKKBN provinsi yang Berkualitas								
	3	Persentase SDM internal Kemendukbangga/BKKBN provinsi yang mengikuti pengembangan kompetensi untuk pemenuhan standar kompetensi	N/A	75	76	77	78	79	Persen

Tabel 4. 5 Rancangan Output (RO), Klasifikasi Rancangan Output (KRO), dan Target Kemendukbang/BKKBN Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta

RO	KRO	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
Bidang Pengendalian Penduduk								
3331.FBA.001	Pemerintah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang pengendalian penduduk	5	5	5	5	5	5	Kabupaten / Kota
3331.FBA.002	Pemerintah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan Kepedulian terhadap Isu Kependudukan	5	5	5	5	5	5	Kabupaten / Kota
3331.QDD.001	Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan penanganan terpadu dampak kependudukan	369	391	413	435	457	479	Kelompok Masyarakat
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi								
3331.QEI.001	Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon	431	450	469	488	507	526	Fasyankes
3331.QDB.002	Fasilitasi dan pembinaan fasilitas kesehatan yang siap melakukan pelayanan KB	431	450	469	488	507	526	Fasyankes
3331.UBA.004	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan peningkatan Peserta KB Aktif penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	5	5	5	5	5	5	Kabupaten / Kota
3331.QDC.001	Fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP	17.194	26.964	28.094	29.746	31.872	36.125	Orang
3331.UBA.003	Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan KB Pascapersalinan, pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan	5	5	5	5	5	5	Kabupaten / Kota
3331.FBA.003	Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang KBKR	5	5	5	5	5	5	Kabupaten / Kota
Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga								

RO	KRO	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
3331.QDE.001	Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK	56.722	56.722	56.722	56.722	56.722	56.722	Keluarga
3331.QDD.003	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja	488	488	488	488	488	488	Kelompok Masyarakat
3331.FBA.004	Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang pembangunan keluarga	5	5	5	5	5	5	Kabupaten /
Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat								
3331.FBA.005	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam bidang penggerakan dan peran serta masyarakat	5	5	5	5	5	5	Kabupaten / Kota
3331.UBA.005	Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING)	5	5	5	5	5	5	Kabupaten / Kota
3331.FBA.007	Pemerintah daerah yang melaksanakan promosi Program bangga kencana melalui media lini bawah oleh pengelola program, petugas dan kader	5	5	5	5	5	5	Kabupaten / Kota
Data dan Informasi di Provinsi								
3331.FBA.006	Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	5	5	5	5	5	5	Kabupaten / Kota
3331.BMA.001	Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	1	1	1	1	1	1	Dokumen
PUSBANG SDM								
3331.DCJ.001	SDM Eksternal yang mendapatkan pelatihan Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana tingkat provinsi	N/A	10	10	10	10	10	Orang
JAKSTRA Provinsi								

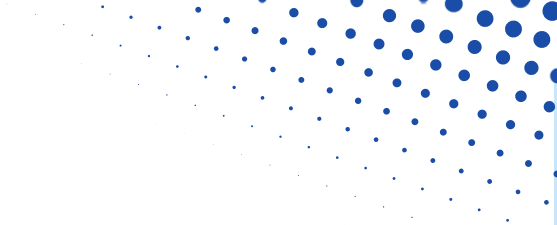
RO	KRO	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
3331.FAE.001	Implementasi Kebijakan strategi bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di provinsi	1	1	1	1	1	1	Laporan
Sekretariat								
5297.EBA.960	Layanan organisasi dan tata kelola internal	1	1	1	1	1	1	Layanan
5297.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	1	Layanan
Pengawasan								
5297.EBD.965	Layanan audit internal	1	1	1	1	1	1	Laporan
PUSBANG SDM								
5297.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	N/A	6	6	6	6	6	Orang

IV.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pendekatan penganggaran diarahkan agar berbasis program (*money follows program*) melalui penganggaran berbasis kinerja. Kerangka pendanaan disusun guna pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Rasionalisasi Kerangka Pendanaan Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta 2025-2029 sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran perlu berorientasi pada hasil dengan menetapkan prioritas nasional dan pengembangan aspek kewilayahan. Penentuan prioritas nasional sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah dan hasil evaluasi capaian indikator Renstra Kemendukbangga/BKKBN serta mempertimbangkan daya ungkit terhadap capaian nasional dan sasaran strategis;

- 
2. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang menjadi bahan pertimbangan besaran pagu anggaran dalam waktu 3 tahun kedepan perlu diperkuat. Reviu *baseline* yang menjadi dasar pengukuran efektivitas dan efisiensi anggaran Kemendukbangga/BKKBN perlu memberikan input terhadap Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang disusun. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja (*value for money*) dan penajaman anggaran berbasis kinerja berdasarkan kinerja tahun berjalan dan bukan terhadap realisasi;
 3. Transfer Ke Daerah (TKD) merupakan skema alternatif kerangka pendanaan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antar daerah. Skema alternatif pendanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang diperuntukan bagi daerah dapat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan DAK non-fisik dalam bentuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB);
 4. Skema hibah dalam dan luar negeri melalui mitra pembangunan juga dapat berkontribusi dan diberikan ruang untuk pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang bersifat inovatif;
 5. Kerangka pendanaan melalui kemitraan dengan swasta atau *public private partnership* (PPP) juga memiliki potensi besar dalam kerangka pendanaan dan akan dalam kemungkinannya.



BAB V

PENUTUP

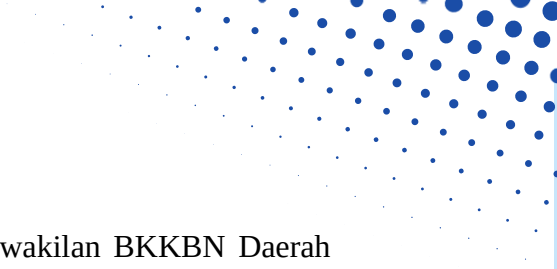


BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga Renstra Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang telah ditetapkan pemerintah. Renstra Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang lebih efektif dan efisien, dengan memperhatikan kerangka waktu dalam pencapaian sasaran program/kegiatan prioritas, baik selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maupun di setiap tahunnya (program/kegiatan jangka pendek/tahunan). Pembangunan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) diharapkan mampu mengikuti perkembangan isu dan lingkungan strategis sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan untuk pencapaian tujuan Kemendukbangga/BKKBN.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun melalui rangkaian proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian beserta evaluasinya. Dengan demikian, seluruh Unit Kerja di lingkungan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi, baik pada setiap tahunnya, pertengahan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)/Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, maupun pada akhir periode 5 tahun (2029) sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum model perencanaan strategis dengan menggambarkan pohon kinerja dapat membantu Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memperjelas dan menerjemahkan upaya dukungan terhadap Visi, Misi, dan Janji Presiden melalui berbagai strategi yang tertera dalam Renstra Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2029, serta untuk mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis dalam merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis.



Selanjutnya, dalam operasionalisasi Renstra Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2029, revitalisasi program/kegiatan dapat dilakukan melalui penajaman tugas/fungsi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengacu pada kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan yang telah disusun. Tentunya pengembangan kegiatan operasional tidak hanya menitikberatkan pada penyusunan kebijakan, tapi juga harus memperhatikan kaidah perencanaan berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran, memberikan tempat yang lebih terhadap fungsi-fungsi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta sinkronisasi program/kegiatan lintas sektor.

Sebagai penutup, Rencana Strategis Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2029, apabila terdapat hal-hal krusial dan strategis yang perlu disesuaikan maka dapat dilakukan perubahan (tertentu) dengan terlebih dahulu melakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik untuk menilai capaian kinerja, efektivitas program, serta dampaknya terhadap pembangunan nasional. Monitoring dan evaluasi (Monev) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Renstra Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025–2029. Monev dilakukan secara komprehensif dan berlapis, melibatkan peran aktif Perwakilan BKKBN di provinsi sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah. Untuk memperkuat efektivitas Monev, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta memanfaatkan aplikasi dan sistem data yang dimiliki, seperti Sistem Informasi Keluarga (SIGA), serta berbagai platform *digital* pendukung lainnya. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui manajemen risiko Pembangunan Nasional, kajian kelayakan, serta sistem data, informasi, dan teknologi terintegrasi, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengamankan perubahan Rencana Strategis (RENSTRA).



LAMPIRAN



LAMPIRAN

Lampiran I

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN UNIT KERJA

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Lokasi	Target Sasaran					Alokasi Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)					
				Base- line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (KEMENDUKBANGGA)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta									63.216.683	66.590.844	70.586.293	74.821.469	79.310.759	
T1	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang Berkualitas													
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)		Provinsi	64,5	66,7	68,8	70,7	72,5	74,2					
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)		Provinsi	81,45	82,52	83,27	83,82	84,24	84,57					
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)		Provinsi	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83					
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SS 1	Meningkatnya keberhasilan pembangunan keluarga												
	ISS 1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		Provinsi	64,8	66,5	68,2	69,9	71,6	73,3				
	SS 2	Menurunnya angka fertilitas pada remaja usia 15-19 tahun												
	ISS 2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)		Provinsi	9,00	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11				
	SS 3	Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan Kependudukan dan Pengendalian Penduduk												
	ISS 3	Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK)		Provinsi	59	60	61	62	62	63				
	SS 4	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi												
	ISS 4	Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) / Unwanted Pregnancy		Provinsi	11,76	11,67	11,58	11,5	11,42	11,34				
	ISS 5	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of Demand Satisfied by Modern Method)		Provinsi	83,58	84,28	84,88	85,50	86,12	86,74				
	SS 5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang merata dalam pelaksanaan program Bangga Kencana												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator			Lokasi	Target Sasaran					Alokasi Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)						
					Base- line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		ISS 6	Indeks Partisipasi Masyarakat (IPaM) dalam Program Bangga Kencana	Provinsi	N/A	67,86	70,86	73,86	76,86	79,86						
		SS 6	Terwujudnya Kemendukbangga/BKKBN yang Kolaboratif, Kapabel dan Berintegritas untuk Melayani Masyarakat													
		ISS 7	Indeks Reformasi Birokrasi	Pusat	77,35	78,0	78,5	80,0	80,5	81,0						
PENGELOLAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI		SS 1	Meningkatnya keberhasilan pembangunan keluarga													
		ISS 1		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Provinsi	64,8	66,5	68,2	69,9	71,6	73,3					
		SS 2	Menurunnya angka fertilitas pada remaja usia 15-19 tahun													
		ISS 2		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)	Provinsi	9,00	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11					
		SK 1	Terwujudnya Keberhasilan Pembangunan Keluarga yang Merata di Provinsi								762.199	807.931	856.406	907.790	962.257	
		IKK 1	Persentase kabupaten/kota dengan capaian ibangga diatas capaian ibangga provinsi		Provinsi	60,00	60,00	60,00	80,00	80,00	80,00					
		IKK 2	Persentase kabupaten/kota dengan capaian angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun dibawah capaian provinsi		Provinsi	60,00	60,25	66,19	72,12	78,06	80,00					
		001	Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK		Provinsi	56.722	56.722	56.722	56.722	56.722	56.722	205.000	217.300	230.338	244.158	258.807
			001.01	Jumlah Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK	Provinsi	56.722	56.722	56.722	56.722	56.722	56.722					
			001.02	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten Kota memberikan pendampingan pengasuhan di BKB HI	Provinsi	5	5	5	5	5	5					
			002	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja	Provinsi	488	488	488	488	488	488	141.045	149.508	158.478	167.987	178.066
			002.01	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja	Provinsi	488	488	488	488	488	488					
			003	Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang pembangunan keluarga	Provinsi	5	5	5	5	5	5	416154	441123	467590	495645	525384
			003.01	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang pembangunan keluarga	Provinsi	5	5	5	5	5	5					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator			Lokasi	Target Sasaran					Alokasi Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)						
					Base- line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		003.02	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten Kota memberikan pendampingan pengasuhan di Tempat Penitipan Anak (TPA)	Provinsi	5	5	5	5	5	5						
		003.03	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan komunitas ayah teladan	Provinsi	5	5	5	5	5	5						
		003.04	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah	Provinsi	5	5	5	5	5	5						
		003.05	Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi bimbingan teknis pendampingan lansia berdaya	Provinsi	5	5	5	5	5	5						
		003.06	Jumlah Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pelayanan keluarga melalui Satyagatra	Provinsi	5	5	5	5	5	5						
		003.07	Jumlah kelompok UPPKA yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga	Provinsi	1.367	1.367	1.367	1.367	1.367	1.367						
	SS 3		Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan Kependudukan dan Pengendalian Penduduk													
		ISS 3		Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK)	Provinsi	59	60	61	62	62	63					
	SK 2		Meningkatnya Integrasi Kebijakan Kependudukan dalam Pembangunan Daerah								377.038	399.661	423.640	449.058	476.001	
		IKK 1	Persentase Kabupaten/Kota dengan nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di atas nilai Nasional		Provinsi	60	60,3	60,9	62,4	63,9	65,4					
		IKK 2	Persentase Kabupaten/Kota dengan klasifikasi nilai Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) minimal kategori "Sedang"		Provinsi	60% (3 kab/ kota)	60% (3 kab/ kota)	80% (4 kab/ kota)	80% (4 kab/ kota)	100% (5 kab/ kota)	100% (5 kab/ kota)					
		001	Pemerintah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang Pengendalian Penduduk		Provinsi	5	5	5	5	5	5	201.264	213.340	226.140	239.708	254.090
			001.01	Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang pengendalian penduduk	Provinsi	5	5	5	5	5	5					
		002	Pemerintah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan Kepedulian terhadap Isu Kependudukan		Provinsi	5	5	5	5	5	5	31.495	33.385	35.388	37.511	39.762
			002.01	Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam	Provinsi	5	5	5	5	5	5					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator			Lokasi	Target Sasaran					Alokasi Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)							
					Base- line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
				peningkatan Kepedulian terhadap Isu Kependudukan													
		003		Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan penanganan terpadu dampak kependudukan	Provinsi	369	391	413	435	457	479	144.279	152.936	162.112	171.839	182.149	
			003.01	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan penanganan terpadu dampak kependudukan	Provinsi	369	391	413	435	457	479						
		SS 4		Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi													
		ISS 4		Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) / Unwanted Pregnancy	Provinsi	11,76	11,67	11,58	11,5	11,42	11,34						
		ISS 5		Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of Demand Satisfied by Modern Method)	Provinsi	83,58	84,28	84,88	85,50	86,12	86,74						
			SK 3	Meningkatnya penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang merata di Provinsi								7.492.724	7.942.288	8.418.825	8.923.954	9.459.393	
			IKK 1	Persentase kabupaten/kota dengan capaian Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern diatas capaian provinsi	Provinsi	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00						
			IKK 2	Jumlah Kabupaten/Kota dengan peserta KB Pascapersalinan mencapai target	Provinsi	3	1	2	3	4	5						
			001	Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon	Provinsi	431	450	469	488	507	526	7.004.364	7.424.626	7.870.104	8.342.310	8.842.849	
				001.01	Jumlah Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon	Provinsi	431	450	469	488	507	526					
			002	Fasilitasi dan pembinaan fasilitas kesehatan yang siap melakukan pelayanan KB	Provinsi	431	450	469	488	507	526	31.495	33.385	35.388	37.511	39.762	
				002.01	Jumlah Fasilitasi dan pembinaan fasilitas kesehatan yang siap melakukan pelayanan KB	Provinsi	431	450	469	488	507	526					
			003	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan peningkatan Peserta KB Aktif penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Provinsi	5	5	5	5	5	5	92.114	97.641	103.499	109.709	116.292	
				003.01	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan peningkatan Peserta KB Aktif penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Provinsi	5	5	5	5	5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator			Lokasi	Target Sasaran					Alokasi Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)						
					Base- line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		003.02	Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi pelayanan vasektomi	Provinsi	5	5	5	5	5	5						
	004	Fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP		Provinsi	17.194	26.964	28.094	29.746	31.872	36.125	58.030	61.512	65.203	69.115	73.262	
		004.01	Jumlah Fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP	Provinsi	17.194	26.964	28.094	29.746	31.872	36.125						
	005	Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan KB Pascapersalinan, pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan		Provinsi	5	5	5	5	5	5	92.114	97.641	103.499	109.709	116.292	
		005.01	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan KB Pascapersalinan, pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan	Provinsi	5	5	5	5	5	5						
	006	Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang KBKR		Provinsi	5	5	5	5	5	5	214.607	227.483	241.132	255.600	270.936	
		006.01	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang KBKR	Provinsi	5	5	5	5	5	5						
	SS 5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang merata dalam pelaksanaan program Bangga Kencana														
	ISS 6	Indeks Partisipasi Masyarakat (IPaM) dalam Program Bangga Kencana		Provinsi	N/A	67,86	70,86	73,86	76,86	79,86						
		SK 4	Meningkatnya implementasi pergerakan dan peran serta masyarakat dalam program kependudukan, Pembangunan keluarga dan keluarga berencana di Provinsi								332.037	351.959	373.077	395.461	419.189	
		IKK 1	Persentase Putus Pakai Alat dan Obat Kontrasepsi		Provinsi	N/A	20,00	19,50	19,10	18,60	18,20					
		IKK 2	Persentase keluarga yang terpapar program bangga kencana		Provinsi	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00					
		IKK 3	Jumlah mitra kerja yang mendukung Program Bangga Kencana		Provinsi	14	19	24	29	34	39					
		001	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam bidang pergerakan dan peran serta masyarakat		Provinsi	5	5	5	5	5	5	206.052	218.415	231.520	245.411	260.136
			001.01	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam bidang pergerakan dan peran serta masyarakat	Provinsi	5	5	5	5	5	5					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator			Lokasi	Target Sasaran					Alokasi Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)					
					Base- line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		002	Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)	Provinsi	5	5	5	5	5	5	78.740	83.464	88.472	93.780	99.407
		002.01	Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)	Provinsi	5	5	5	5	5	5					
		003	Pemerintah daerah yang melaksanakan promosi Program bangga kencana melalui media lini bawah oleh pengelola program, petugas dan kader	Provinsi	5	5	5	5	5	5	47.245	50.080	53.085	56.270	59.646
		003.01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan promosi Program bangga kencana melalui media lini bawah oleh pengelola program, petugas dan kader	Provinsi	5	5	5	5	5	5					
		SK 5	Terwujudnya Implementasi kebijakan strategi yang termanfaatkan di Tingkat Provinsi								15.645	16.584	17.579	18.634	19.752
		IKK 1	Indeks Implementasi Kebijakan Strategi Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di provinsi	Provinsi	N/A	65,00	65,10	65,20	65,30	65,40					
		001	Implementasi Kebijakan strategi bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di provinsi	Provinsi	1	1	1	1	1	1	15.645	16.584	17.579	18.634	19.752
		001.01	Jumlah laporan implementasi Kebijakan strategi bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di provinsi	Provinsi	1	1	1	1	1	1					
		SK 6	Terwujudnya SDM Eksternal yang mendapatkan pelatihan Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana tingkat provinsi								115.530	122.462	129.810	137.599	145.855
		IKK 1	Persentase SDM Eksternal provinsi yang mendapatkan pelatihan	Provinsi	N/A	10	10	10	10	10					
		001	SDM Eksternal yang mendapatkan pelatihan Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana tingkat provinsi	Provinsi	N/A	10	10	10	10	10	115.530	122.462	129.810	137.599	145.855
		001.02	Persentase SDM Eksternal provinsi yang mendapat pelatihan	Provinsi	N/A	100	100	100	100	100					
		001.02	Persentase peserta pelatihan SDM Eksternal yang lulus dengan kategori memuaskan dan sangat memuaskan	Provinsi	N/A	83	84	86	88	90					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator			Lokasi	Target Sasaran					Alokasi Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)					
					Base- line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		SK 7	Terwujudnya pengelolaan data dan teknologi informasi yang berkualitas di setiap tingkatan wilayah							3.152.458	3.341.606	3.542.102	3.754.628	3.979.906	
		IKK 1	Persentase pemerintah daerah yang memiliki Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi yang berkualitas	Provinsi	N/A	80	85	90	95	100					
		001	Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Provinsi	5	5	5	5	5	5	31.495	33.385	35.388	37.511	39.762
			001.01	Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Provinsi	5	5	5	5	5					
		002	Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Provinsi	1	1	1	1	1	1	3.120.963	3.308.221	3.506.714	3.717.117	3.940.144
			002.01	Jumlah laporan pelaksanaan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Provinsi	1	1	1	1	1					
PELAKSANAAN DUKUNGAN MANAJEMEN DI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI		SS 6	Terwujudnya Kemendukbangga/BKKBN yang Kolaboratif, Kapabel dan Berintegritas untuk Melayani Masyarakat												
		ISS 7	Indeks Reformasi Birokrasi	Pusat	77,35	78	78,5	80	1	81					
		SK 1	Terwujudnya penyelenggaraan Dukungan manajemen yang berkualitas di Tingkat Provinsi							50.467.482	53.495.531	56.705.263	60.107.579	63.714.034	
		IKK 1	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen di Tingkat Provinsi	Provinsi	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56					
		960	Layanan organisasi dan tata kelola internal	Provinsi	1	1	1	1	1	1	772.312	818.651	867.770	919.836	975.026
			960.01	Jumlah Layanan hukum, organisasi dan tata kelola internal yang dilaksanakan	Provinsi	1	1	1	1	1					
		994	Layanan Perkantoran	Provinsi	1	1	1	1	1	1	49.695.170	52.676.880	55.837.493	59.187.743	62.739.008
			994.01	Jumlah Layanan Perkantoran yang dilaksanakan	Provinsi	1	1	1	1	1					
		SK 2	Terwujudnya pengelolaan program yang akuntabel dan berintegrasi di Tingkat Provinsi							85.000	90.100	95.506	101.236	107.310	
		IKK 1	Indeks Zona Integritas (ZI)	Provinsi	89,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00					
		965	Layanan audit internal	Provinsi	1	1	1	1	1	1	85.000	90.100	95.506	101.236	107.310
			965.01	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Provinsi	1	1	1	1	1					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator			Lokasi	Target Sasaran					Alokasi Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)					
					Base- line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		SK 3	Terwujudnya SDM internal Kemendukbangga/BKKBN provinsi yang Berkualitas							416.570	22.722	24.085	25.530	27.062	
		IKK 1	Persentase SDM internal Kemendukbangga/BKKBN provinsi yang mengikuti pengembangan kompetensi untuk pemenuhan standar kompetensi	Provinsi	N/A	75	76	77	78	79					
		996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi	N/A	110	6	6	6	6	416.570	22.722	24.085	25.530	27.062
			996.01	Persentase SDM internal Kemendukbangga/BKKBN provinsi yang mendapatkan pelatihan	Provinsi	N/A	100	100	100	100	100				
			996.02	Persentase peserta pelatihan SDM internal Kemendukbangga/BKKBN provinsi yang lulus dengan kategori memuaskan dan sangat memuaskan	Provinsi	N/A	83% dari 110 (91)	84% dari 6 (5)	86% dari 6 (5)	88% dari 6 (5)	90% dari 6 (5)				

Lampiran II

MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DARI SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS UNIT KERJA

Kode	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Dalam Ribu Rupiah)					Total (Dalam Ribu Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KP.01 Penguatan Institusi keluarga untuk Penanaman Nilai-Nilai Moral, Integritas Karakter dan Pengembangan Psikososial Anak		Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini	55,66	56,16	56,61	57,04	57,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja	45	51	57	63	70										
		Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah	45	51	57	63	70										
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	85,2	85,7	86,2	86,7	87,2										
ProP 2 Penguatan Kualitas Pengasuhan dalam keluarga																	
068.DJ.3331 .QDE.001	Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK (**)	Jumlah Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK	56722	56722	56722	56722	56722										
		Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten Kota memberikan pendampingan pengasuhan di BKB HI	5	5	5	5	5										
KP 02 Penyediaan Fasilitas Pendukung Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Utama keluarga		Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau	70 (3491)	75 (3740)	80 (3990)	85 (4239)	90 (4488)	144.279	152.936	162.112	171.839	182.149	144.279	152.936	162.112	171.839	182.149
		Persentase tempat penitipan anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan	10	20	30	40	50										
ProP 1 Penyediaan Fasilitas dan Lingkungan Pendukung Keluarga																	
068.DJ.3331 .QDD.001	Kampung Keluarga Berkualitas (**)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan penanganan terpadu dampak kependudukan	391	413	435	457	479	144.279	152.936	162.112	171.839	182.149	144.279	152.936	162.112	171.839	182.149
KP 01 Penurunan kematian ibu dan anak		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR 15-19)	19,4	19	18,6	18,2	17,8	150.144	159.153	168.702	178.824	189.554	150.144	159.153	168.702	178.824	189.554
		Persentase KB Pascapersalinan	57	60	64	69	75										

Kode	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Dalam Ribu Rupiah)					Total (Dalam Ribu Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
ProP 2 Penguatan pelayanan Promotif & Preventif ibu dan anak																	
068.DJ.3331 .UBA.003	Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan KB Pascapersalinan, pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan KB Pascapersalinan, pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan	5	5	5	5	5	92.114	97.641	103.499	109.709	116.292	92.114	97.641	103.499	109.709	116.292
068.DJ.3331 .QDC.001	Fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP	Jumlah Fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP	26964	28094	29746	31872	36125	58.030	61.512	65.203	69.115	73.262	58.030	61.512	65.203	69.115	73.262
KP 02 Pencegahan dan Penurunan Stunting		Persentase keluarga sasaran yang mendapatkan pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	75	80	85	90	95	205.000	217.300	230.338	244.158	258.807	205.000	217.300	230.338	244.158	258.807
ProP 2 Penguatan Intervensi Sensitif Stunting																	
068.DJ.3331 .QDE.001	Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK (**)	Jumlah Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK	56722	56722	56722	56722	56722	205.000	217.300	230.338	244.158	258.807	205.000	217.300	230.338	244.158	258.807
		Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten Kota memberikan pendampingan pengasuhan di BKB HI	5	5	5	5	5										
KP 03 Peningkatan Pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan Lansia serta KB dan Kespro		Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i> (mCPR)	61,8	61,9	62	62,1	62,2	8.263.759	8.759.585	9.285.160	9.842.269	10.432.806	8.263.759	8.759.585	9.285.160	9.842.269	10.432.806
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need KB</i>)	10,5	10	9,5	9	8,5										
		Persentase peserta KB aktif metode	25,7	26	26,2	26,4	26,7										
ProP 4 Peningkatan Pelayanan KB dan Kespro																	
068.DJ.3331 .QDD.003	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja (**)	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja	3930	3930	3930	3930	3930	1.135.786	1.203.933	1.276.169	1.352.739	1.433.903	1.135.786	1.203.933	1.276.169	1.352.739	1.433.903
068.DJ.3331 .QEI.001	Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon	Jumlah Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon	450	469	488	507	526	7.004.364	7.424.626	7.870.104	8.342.310	8.842.849	7.004.364	7.424.626	7.870.104	8.342.310	8.842.849

Kode	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Dalam Ribu Rupiah)					Total (Dalam Ribu Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
068.DJ.3331 .QDB.002	Fasilitasi dan pembinaan fasilitas kesehatan yang siap melakukan pelayanan KB	Jumlah Fasilitasi dan pembinaan fasilitas kesehatan yang siap melakukan pelayanan KB	450	469	488	507	526	31.495	33.385	35.388	37.511	39.762	31.495	33.385	35.388	37.511	39.762
068.DJ.3331 .UBA.004	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan peningkatan Peserta KB Aktif penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan peningkatan Peserta KB Aktif penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	5	5	5	5	5	92.114	97.641	103.499	109.709	116.292	92.114	97.641	103.499	109.709	116.292
		Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi pelayanan vasektomi	5	5	5	5	5										
KP 07 Tata Kelola Pendampingan/Penyuluhan								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ProP 01 Pendamping Pembangunan Lingkup Keluarga Berencana																	
068.DJ.3331 .QDD.001	Kampung Keluarga Berkualitas (**)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan penanganan terpadu dampak kependudukan	391	413	435	457	479										
068.DJ.3331 .QDD.003	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja (**)	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja	488	488	488	488	488										

Lampiran III

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Beberapa substansi dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan beberapa substansi yang diatur sebagai upaya dukungan terhadap dukungan transformasi bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, antara lain: 1. Substansi kependudukan dan pembangunan keluarga memiliki dampak strategis dan lintas sektor sehingga perlu diatur pada tingkat Undang-Undang. 2. Kebijakan kependudukan menyangkut pengendalian fertilitas, mortalitas, serta migrasi yang memengaruhi perencanaan pembangunan nasional. Hal ini bukan hanya isu teknis, tetapi menyangkut arah pembangunan jangka panjang dan stabilitas nasional. 3. Pembangunan keluarga tidak hanya menyangkut pembinaan sosial, melainkan fondasi bagi pembangunan manusia yang berkualitas. 4. Kebijakan pembangunan keluarga berisiko tidak memiliki legitimasi kuat, tumpang tindih dengan aturan sektoral lain, dan tidak	Deputi Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	1. Kemensekneg; 2. Kemen PPN/ Bappenas; 3. Kemenkeu; 4. Kemenkes; 5. Kemenko PMK; 6. Kemendagri; 7. Kemenkum; 8. Kemen PPPA.	2026 - 2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
		dapat mengintegrasikan berbagai program lintas kementerian/lembaga. 5. Perubahan kelembagaan dalam pelaksanaan urusan pemerintah bidang kependudukan dan pembangunan keluarga.			
2	Usulan Perubahan Lampiran I Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan pembagian urusan bidang kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Dengan adanya kelembagaan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga perlu mengubah urusan yang ada pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Usulan perubahan tersebut dalam upaya pelaksanaan urusan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di daerah.	Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama	1. Kemendagri; 2. Kemenkeu; 3. Kemenko PMK; 4. Kemenkum.	2025 - 2029
3	Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Program kegiatan DAK akan membantu mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dalam hal tersebut pelaksanaan urusan bidang Kependudukan dan Pembangunan perlu petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Dana	Biro Perencanaan dan Keuangan	1. Kemen PPN/ Bappenas; 2. Kemenkeu; 3. Kemendagri; 4. Kemenkum.	2025 - 2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
		Bantuan Operasional Keluarga Berencana.			
4	Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tentang pelaksanaan urusan pemerintah Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Dalam rangka usulan perubahan urusan bidang pengendalian penduduk dan KB menjadi urusan Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga perlu merubah pengaturan NSPK Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan urusan di daerah,	Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	1. Kemendagri; 2. Kemenkeu; 3. Kemenko PMK; 4. Kemenkum.	2025 - 2029
5	Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)	Dalam mengimplementasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagai upaya mencapai kualitas penduduk yang tinggi, mewujudkan penduduk yang maju, mandiri, dan sejahtera, serta memastikan keseimbangan antara pembangunan dengan pertumbuhan penduduk demi kemajuan bangsa dan kelestarian diperlukan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.	Deputi Bidang Pengendalian Penduduk	1. Kemen PPN/ Bappenas; 2. Kemenkeu; 3. Kemenko PMK; 4. Kemendagri; 5. Kemenkum; 6. BPS.	2026 - 2027
6	Perubahan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan	Dalam menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional diperlukan evaluasi terkait dengan Perwakilan BKKBN, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan perubahan Peraturan Kepala Badan	Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	1. Kemendagri; 2. Kemenkeu; 3. KemenPAN RB; 4. Kemenkum.	2026 - 2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
	Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi	Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011			
7	Perubahan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Dengan adanya transformasi kelembagaan menjadi kementerian perlu Perubahan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 yang memuat: a. Penyesuaian tugas dan fungsi; b. Pembentukan satuan kerja; c. Penambahan Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana	1. Kemendagri; 2. Kemenkeu; 3. KemenPAN RB; 4. Kemenkum.	2026 - 2027
8	Perubahan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Perubahan Peraturan ini bertujuan untuk: a. meningkatkan kinerja dan efektivitas Pendayagunaan Penyuluh KB dan PLKB oleh PD-KB di daerah kabupaten/kota dalam mencapai tujuan program; b. pemeratakan pelayanan masyarakat c. meningkatkan pelayanan.	Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan	1. KemenPAN RB; 2. Kemenkum.	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
9	Perubahan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan	Perubahan Peraturan ini dimaksudkan menjadi pedoman kerja bagi pengelola dan pelaksana program dan pelayanan KBPP, muatan dalam perubahan ini: - Tata Kelola Program dan Pelayanan KBPP; - Sistem Informasi Dan Evaluasi KBPP; - Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pelayanan KBPP; - Pendanaan Kegiatan Program KBPP dan Pembiayaan Pelayanan KBPP; - Alat Kontrasepsi dan Material Pendukung Kegiatan dan Pelayanan KBPP; - Pembinaan Partisipasi Keluarga dan Masyarakat.	Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi	- Kemenkes, - Kemenko PMK; - Kemenkum; - Kemen PPPA.	2025
10	Perubahan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perubahan Peraturan ini mengatur mengenai pedoman penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. Jabatan Fungsional di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga terdiri atas: - Jabatan Fungsional Penata KKB; - Jabatan Fungsional Penyuluh KB; dan - Jabatan Fungsional PLKB. Ruang lingkup pedoman penyelenggaraan Uji Kompetensi terdiri atas: - penyelenggara Uji Kompetensi; - peserta Uji Kompetensi;	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana	- KemenPAN RB; - Kemenkum; - BKN.	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
		c. materi, metode, dan periode Uji Kompetensi; d. tahapan Uji Kompetensi; dan e. sertifikat Kompetensi.			
11	Perubahan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Peraturan ini disusun karena terjadinya transformasi kelembagaan menjadi kementerian dan dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja dalam pembuatan, pengamanan, penandatanganan, dan pengendalian Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ruang lingkup Tata Naskah Dinas meliputi: a. jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas; b. pembuatan Naskah Dinas; c. pengamanan Naskah Dinas; d. pejabat penanda tangan Naskah Dinas; dan e. pengendalian Naskah Dinas.	Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	1. KemenPAN RB; 2. Kemenkum; 3. ANRI.	2025
12	Perubahan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	a. dalam rangka perubahan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diperlukan pengaturan tugas, fungsi, dan kewenangan terkait koordinasi, penyusunan rencana, dan fasilitasi penyiapan program penyusunan Peraturan Menteri; b. meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam	Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	1. Kemensekneg; 2. Kemenkum.	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
		pembentukan Peraturan Menteri yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga .			
13	Perubahan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 205/PER/B4/2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Perubahan Penyusunan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur sebagai acuan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memuat: a. langkah-langkah persiapan penyusunan; b. tahap-tahap penyusunan; c. pembuatan diagram alur kegiatan.	Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	1. KemenPAN RB; 2. Kemenkum;	2026
14	Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN	Mekanisme penyediaan informasi publik kepada masyarakat di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan prinsip keterbukaan, yang dilaksanakan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pemerintah, dengan dasar utama Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Layanan ini mencakup proses permintaan informasi, penyediaan informasi, hingga penanganan pengaduan masyarakat dan keberatan atas informasi.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	1. Kementerian Komunikasi dan Digital; 2. Kemen PPN/ Bappenas; 3. KemenPAN RB; 4. Kemenkum.	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
15	Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tentang Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja	Peraturan ini disusun dalam pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) meliputi: a. pembentukan kelompok; b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rutin; c. pengembangan dan pematapan kelompok melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan. Pengelolaan BKR bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan orang tua dalam membina remaja agar tumbuh kembang secara optimal.	Direktorat Bina Ketahanan Remaja	1. KemenPPPA; 2. Kemen PPN/ Bappenas; 3. Kemensos; 4. Kemenkum; 5. BIN.	2027
16	Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan di Bidang Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.	Dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputan Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana diperlukan payung hukum dalam penciptaan dan penyusunan kebijakan di bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.	Deputi Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	1. Kemenkum; 2. LAN; 3. BRIN.	2025 - 2029

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

WIHAJI



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN
Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta